

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG,
KABUPATEN WAJO**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh
Andi Siti Sri Hutami
E12113305**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

LEMBARAN PENGESAHAN**SKRIPSI****ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Siti Sri Hutami

E 12113305

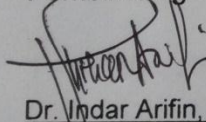
Yang telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal 26 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

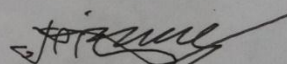
Pembimbing I



Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 19630407 198903 2 003

Pembimbing II



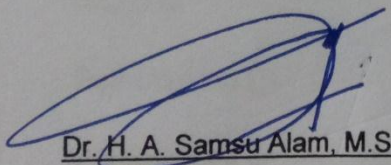
Dr. Jayadi Nas, M.Si

NIP. 197105011998031 004

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik

dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas

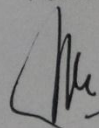


Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si

NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu

Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. Nurlinah, M.Si

NIP. 19630912 1987 02 2 001

LEMBARAN PENERIMAAN
SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Siti Sri Hutami

E12113305

Telah diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. Indar Arifin, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	(.....)
Anggota	: A. Murfhi S.Sos., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Indar Arifin, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliauulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Drs. Asdar, M.Pd dan Ibunda Hj. Andi Fatmawati dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selau memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah

SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan Ilmu pilitik dan seluruh staf pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan
5. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai, serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini .
7. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA, Dr. Rasyid Thaha, M.Si, Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si, Dr Hasrat Arif Saleh M,Si, Drs Salam Muchtar Dr.Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. A. M. Rusli, M.Si, H. Suhardiman, S.Sos, M.Sos, A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Andi Murfhi, S. IP, M.Si, Hariyanto,S.IP, MA, Erwin Musdah, S.IP, M.IP, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si
10. Seluruh informan penulis di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa,LPMD,Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.

11. Kepada kakek dan nenek tercinta H. Andi Mappabeta, Hj. Andi Nomba, yang telah menginspirasi serta memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
12. Kepada Om dan tante tercinta penulis yaitu H. Andi Pangoriseng, S.Pd., M.Si., Hj. Andi Safa, S.Pd., Ir. Andi Muliati, Andi Salewangeng T.Dp, Ulil Amri, S.T., dan Andi Dewi Astuti, S.Pd yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
13. Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi Andi Ibnu Munzir SH dan Andi Afifatul Ulfa terima kasih telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
14. Kepada sepupu penulis yang sangat disayangi yaitu A.Uga, A.Ayi, dan si bungsu A.Alim yang selalu penulis rindukan setiap saat dan tidak hentinya memberi semangat dan menghibur penulis.
15. Kepada Sahabat dan Saudara seperjuangan penulis semasa bersekolah di SMP Negeri 1 GILIRENG dan SMK Negeri 1 GILIRENG yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian. semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.

16. Kepada sahabat-sahabat penulis yang biasa di panggil *Ummalite* yaitu Chana S.IP, Kakak Uni, Mega, Salfia, Sundari, Beatrix, Iva, Dina dan Suci terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
17. Kepada Saudaraku (Lebensraum) yaitu Azura S.IP, Yani S.IP, Akbar S.IP, Irma S.IP, Fitrah S.IP, Juwita S.IP, Suna S.IP, Ike, Ayyun, Anti, Alif, Jusna, Icha, Dewi, Reza, Rosandi, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Arya, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Fitri, Syarif, Dede, Aqil, Dana, Ade, Dirga, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ina, Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, Amel dan Almh. lis yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga.
18. Kepada rekan-rekan Hipermawa Komisariat Gilireng yang banyak memberikan Canda, Tawa dan motivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan

berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan.

Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.

20. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Soppeng Kecamatan Lilirilau, khususnya teman serumah selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Kakak Iwan, Kakak Fahrul, Unik, Edwina, Dhian, Ayu dan Bapak Desa Paroto Makmur dan ibu, beserta seluruh masyarakat Desa Paroto.
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

Makassar, April 2017

Andi Siti Sri Hutami

DAFTAR ISI

Sampul	I
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Matriks	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Intisari	xviii
Abstract	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Konsep Desa	10
2.1.2. Pemerintah Desa	15

2.1.3. Pengelolaan	19
2.1.4. Alokasi Dana Desa (ADD)	20
2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.2. Kerangka Pikir Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Lokasi Penelitian	33
3.2. Tipe Penelitian	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Informan Penelitian	35
3.5. Sumber Data	36
3.6. Definisi Konsep	36
3.7. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kabupaten Wajo	39
4.1.1. Sejarah Kabupaten Wajo	39
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah	41
4.1.3. Kependudukan	44
4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Wajo	46
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Gilireng	47
4.2.1. Sejarah Kecamatan Gilireng	47
4.2.2. Luas wilayah Kecamatan Gilireng	48

4.2.3. Pemerintahan	52
4.2.4. Penduduk	54
4.2.5. Sosial	56
4.2.6. Visi Misi Kecamatan Gilireng	58
4.3. Gambaran Umum Desa Abbatireng	67
4.3.1. Sejarah Desa	67
4.3.2. Kondisi Desa	69
4.3.3. Struktur kelembagaan Pemerintahan Desa	71
4.3.4. Visi Misi Desa Abbatireng	74
4.4. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.	75
4.4.1. Perencanaan	78
4.4.2. Pelaksanaan	87
4.4.3. Penatausahaan	98
4.4.4. Pelaporan	102
4.4.5. Pertanggung Jawaban	110
4.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.	114
4.5.1 Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana	114

Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.	
4.5.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.	117
BAB V PENUTUP	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Wajo	42
Tabel 2.	Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo.	43
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo	44
Tabel 4.	Luas wilayah Menurut Desa/ Kelurahan di kecamatan Gilireng	49
Tabel 5.	Posisi dan tinggi wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng	50
Tabel 6.	Jarak dari Kantor Desa/Kelurahan Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota kabupaten di kecamatan di Kecamatan Gilireng (km)	51
Tabel 7.	Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut administrasinya di Kecamatan Gilireng	52
Tabel 8.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng.	54
Tabel 9.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut desa atau Kelurahan di Kecamatan Gilireng	55

Tabel 10.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar(SD) menurut Desa/Kelurahan yang di Kecamatan Gilireng	56
Tabel 11.	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng	57
Tabel 12.	Sejarah Pemerintahan Desa dan Nama-nama Kepala DesaSejak berdirinya Desa Abbatireng	67
Tabel 13.	Proses Peristiwa Sejarah di Desa Abbatireng	68
Tabel 14.	Gambaran Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Wajo Ta.2016	77
Tabel 15.	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Abbatireng	119

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1.	Hasil Analisis Terhadap tahapan Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng	86
Matriks 2.	Hasil Analisis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng	96
Matriks 3.	Hasil Analisis Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Oleh Bendahara Desa	100
Matriks 4.	Hasil Analisis terhadap Pelaporan Penggunaan ADD di Desa Abbatireng.	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir Peneltitian	32
Gambar 2.	Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Abbatiireng	71
Gambar 3.	Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Abbatiireng.	84
Gambar 4.	Alur Pentausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Abbatiireng.	100
Gambar 5	Alur Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Peraturan Bupati Wajo tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 3. Peraturan Bupati Wajo tentang Petunjuk teknis ADD

Lampiran 4. Format RKPDesa Abbatireng

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi Realisai Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Abbatireng

Lampiran 7. Peta Administrasi Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Wajo,

Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Penelitian

INTISARI

Andi Siti Sri Hutami, Nomor Induk Mahasiswa **E12113305**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, dibawah bimbingan Ibu Dr.Indar Arifin, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)*

ABSTRACT

Andi Siti Sri Hutami, E12113305, The Study Program of Government Science, Faculty of Social Science and Political Science Hasanuddin University essay with the title of Analysis Of The Allocation Of Fund OF The Village (ADD) in the Village Abbatireng of the District Gilireng of the Regency Wajo. Under the guidance of Mrs. Dr. Indar Arifin, M.Si as the counselor I and Mr. Dr. Jayadi Nas, M.Si as the counselor II.

This research aims to determine the Management Allocation Of Fund OF The Village (ADD) in the Village Abbatireng of the District Gilireng of the Regency Wajo and the factors that influence. To achieve that goal, used method of research qualitative with parse the data is descriptive. The technique collection of the data by observation, interview, as well as document and archives by using technical analysis descriptive qualitative.

The result of the research showed: First, process management of ADD, include planning, impelementation, structuring, reporting, and accountability. The management of ADD is done by government of the Village Abbatireng of the District Gilireng of the Regency Wajo has followed the rules of the technical have been set out in the legislation. But in the process of reporting is not optimal yet. This is evident from the reporting and accountability that has been delayed. For the prosess reporting realization the use of ADD is not appropriate with the existing schedule, so it causing delays liquefaction of fund for the next stage. And so it is with the accountability the use of the ADD so the society can not evaluate the result the work of the Government of the village and accountability to the Local Government is not exact time. Secondly, the factor that influence Management Allocation Of Fund OF The Village (ADD) in the Village Abbatireng of the District Gilireng of the Regency Wajo include the factor supporter and the factor inhibiting. The factor supporter is The As for the factor be supporter that is participation society in terms of donate the lands to the Government of the village and facilities and infrastructure is adequate. But the factor inhibiting is human resources in terms officials government of village in the Village Abbatireng average are hightschool cause the lack of knowlegde about management of ADD, directive of technical management of ADD every year is changing. It is cause the team of the activities of ADD have difficulties in the impelemtation their duty and communication in terms society that is less able to express opinions in public

Keywords : the government of the village, Management, the allocation of village funds

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan

yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih

dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan

kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD disalurkan

dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wajo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Wajo berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat penyusun rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo
2. Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo .

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep yang didalamnya akan mejelaskan pengertian konsep Desa, pemerintah Desa, dan pengelolaan keuangan Desa.

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan

yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955: 121) adalah setiap pemukiman para petani (*peasants*). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006 : 1) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Koentjaraningrat (1977 : 162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut Landis H. (2012 :12-13), seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika Serikat,

mengemukakan definisi tentang Desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu Untuk tujuan analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.2. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur

memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat

(4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.1.3. Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Menurut Harsoyo (1977:121) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sedangkan Menurut Nugroho (2003:119) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2.1.4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Menurut Widjaja H.A.W. (2003:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi

dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan .

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu

menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima .

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya

perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Menurut Suharto (2010:71), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Manila I. GK. (1996 : 25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala

Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para

staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Suharto (2010:79) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan .Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur

staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau

kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

d. Pelaporan

Menurut Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

e. Pertanggung Jawaban

Menurut Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) .

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Wajo telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses Pengelolaan ADD melalui Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tetang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Wajo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Wajo berharap

dengan adanya Alokasi Dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desanya dan ikut merealisasikannya. Namun, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di maksud dengan Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pelaporan dilakukan dalam bentuk Laporan berkala dan Laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian Laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai

oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMDK Kabupaten Wajo sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Proses dalam penyampaian laporan penggunaan ADD Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila Laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati berikutnya kemudian Menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota, Pertanggung Jawaban terdiri dari kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

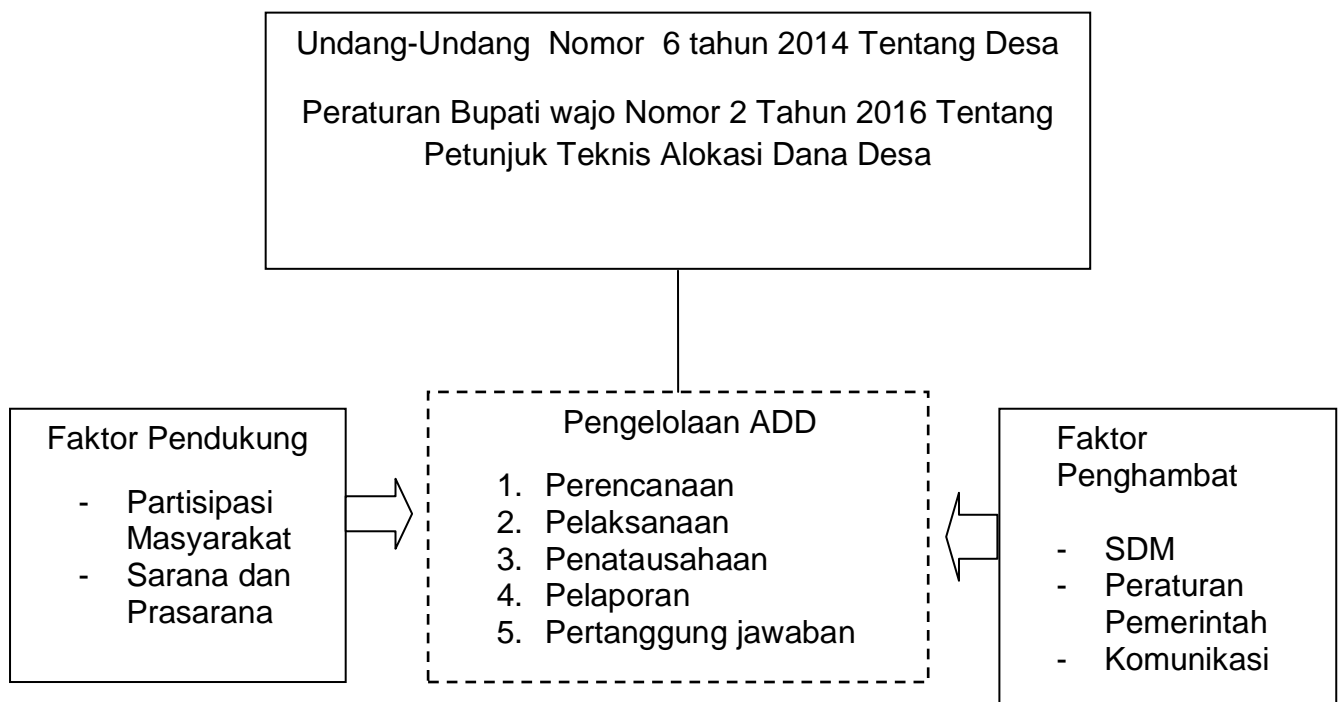
Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi

masyarakat, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi

Gambaran singkat Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini pengelolaan ADD di Desa Abbatiweng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo beserta factor yang mempengaruhinya melalui skema berikut

Gambar. 1

Skema Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo dimana titik pengambilan data penelitian tentang Pengelolaan ADD di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Menurut Bogdan dan Taylor dalam ley J (1996), Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literaur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian .

3.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah

1. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo
2. Kepala Desa Abbatireng
3. Sekretaris Desa Abbatireng
4. Bendahara Desa Abbatireng
5. Ketua BPD Desa Abbatireng
6. Kepala Dusun
7. Tokoh masyarakat
8. Masyarakat

3.5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.6. Definisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni :

- a. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Desa Abbatireng.

- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan Desa didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu :
 - a) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan ADD yaitu pembuatan rencana.
 - b) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan ADD.
 - c) Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan ADD.
 - d) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola ADD untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab ADD.
 - e) Pertanggung jawaban keuangan Desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawab penggunaan

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

- c. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang penelitian beserta hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng dan Kabupaten Wajo yang meliputi sejarah, kondisi geografis, Aspek sosial dan aspek Pendidikan. Selain itu, bab ini menguraikan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang berpengaruh baik itu sifatnya menghambat maupun mendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, selain melalui studi dokumentasi, peneliti juga melakukan *interview* (Wawancara) terhadap beberapa informan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi. pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa.

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

4.1.1. Sejarah Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibu kota Sengkang, dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun

1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo memang tak bisa lepas dari peran sang pemimpin daerah tingkat II Kabupaten Wajo ke-8, Dachlan Maulana. melalui Peraturan daerah Kabupaten Wajo, nomor 12 tahun 1995, tepat tanggal 17 juli disetujui penetapannya sebagai Hari Jadi Wajo.

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk kerajaan wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama tosora yang kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Wajo.

Wajo yang dulunya adalah kerajaan yang sangat sempit dengan jumlah penduduk sedikit dan memiliki mekanisme yang khas dalam mengelola rakyatnya kini telah menjadi Kabupaten daerah tingkat II dalam negara kesatuan Indonesia, orang Wajo senang tiasa memegang slogan mereka dari berdirinya kerajaan hingga di zaman Republik modren ini. *“Maradeka to wajo’e ade’na popuang”* . Dimana antara pemerintah dan rakyat senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum dalam pemerintahan dan pengelolaan hajat hidup orang banyak. Tinjauan tatanan politik dan kekuasaan , Wajo mengalami perubahan dari kerajaan menjadi bagian dari provinsi sulawesi Selatan.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya Sengkang, sekitar 242 km dari Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan), Wajo yang luas wilayahnya 250.619 hektar, terbagi atas 14 kecamatan, 44 kelurahan dan 132 desa, memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

4.1.2. Keadaan Geografis Wilayah

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53'-120° 27' BT. Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng
- c. Sebelah Timur : Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Luas wilayah Kabupaten Wajo adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah ini dirincikan dengan penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%). Pada tahun 2013 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan yakni Sabbang Paru, Tempe, Pammana, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua.

Gambar Peta Administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada lampiran Berikut pembagian wilayah dan luas setiap kecamatan di Kabupaten Wajo dalam tabel 1.

Tabel 1. Pembagian dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2015

Kecamatan (1)	Luas (km²) (2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (3)
Sabbang Paru	132,75	5,30
Tempe	38,27	1,53
Pammana	162,10	6,47
Bola	220,13	8,78
Takkalalla	179,76	7,17
Sajoanging	167,01	6,66
Penrang	154,90	6,18
Majauleng	225,92	9,01
Tanasitolo	154,60	6,17
Belawa	172,30	6,88
Maniangpajo	175,96	7,02
Gilireng	147,00	5,87
Keera	368,36	14,70
Pitumpanua	207,13	8,26
WAJO	2 506,19	100,00

Sumber : Publikasi Wajo dalam Angka, 2017

Wilayah 14 Kecamatan yang terbentuk di dalamnya terdapat wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu 48 wilayah yang berstatus

Kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 176 desa/kelurahan, masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. Berikut disajikan jumlah Desa dan Kelurahan setiap Kecamatan di Kabupaten Wajo dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Wajo, 2015

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbang Paru	12	3	15
2	Tempe	0	16	16
3	Pammana	13	2	15
4	Bola	10	1	11
5	Takkalalla	11	2	13
6	Sajoanging	6	3	9
7	Penrang	9	1	10
8	Majauleng	14	4	18
9	Tanasitolo	15	4	19
10	Belawa	6	3	9
11	Maniangpajo	5	3	8
12	Gilireng	8	1	9
13	Keera	9	1	10
14	Pitumpanua	10	4	14
Jumlah		128	48	176

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2017

Berdasarkan data tabel 2, jumlah Desa dan Kelurahan paling banyak terdapat di Kecamatan Tanasitolo sebanyak 15 Desa dan 4 Kelurahan. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah Desa dan Kelurahan

paling sedikit yakni Maniangpajo yakni Desa sebanyak 5 dan 3 Kelurahan.

4.1.3. Kependudukan

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal dengan arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang perdagangan dan industry kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah Kabupaten Wajo .

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2014

No.	Kecamatan	Penduduk
1	Sabbang Paru	26492
2	Tempe	61964
3	Pammana	32047
4	Bola	20074
5	Takkalalla	21569
6	Sajoanging	19252
7	Penrang	16369
8	Majauleng	32764
9	Tanasitolo	40678
10	Belawa	32709
11	Maniangpajo	16557
12	Gilireng	11652
13	Keera	23198
14	Pitumpanua	43962
Wajo		399287

Sumber : Publikasi Registrasi Kependudukan Kabupaten Wajo, 2017

Keadaan penduduk Kabupaten Wajo berdasarkan data tahun 2014 pada tabel 2 berjumlah 399.287 orang. Penduduk yang paling padat terletak di Kecamatan Tempe yang merupakan tempat ibu kota kabupaten dengan jumlah 61.964 jiwa dan daerah yang jumlah penduduknya dengan jumlah yang sedikit dibandingkan daerah lain terdapat di Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.652 jiwa. Tidak meratanya pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan dan masyarakat lebih terpusat pada ibukota disebabkan antara lain kawasan kota dalam hal ini di Kecamatan Tempe masih tersedia lahan yang cukup luas untuk menjadi daerah hunian masyarakat, disatu sisi kawasan ini dilengkapi prasarana yang cukup berkembang sehingga mendorong sebahagian penduduk terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk bertempat tinggal di kawasan ini. Kecepatan perkembangan kehidupan di ibukota mampu membantu perbaikan hidup dibandingkan dengan perkembangan di desa, sehingga banyak masyarakat luar kota datang ke ibukota kabupaten untuk mencoba memperbaiki tingkat pendidikan dan kehidupannya di ibukota kabupaten tepatnya di Kecamatan Tempe.

Kondisi ini diharapkan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yang ada, pola penyebaran penduduk dan tingkat fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di kawasan kota saja, akan tetapi menyebar keseluruh bagian kecamatan dan kabupaten sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan tidak berpusat pada satu titik saja.

4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Wajo

Visi

Wajo yang berkarakter religius , produktif , unggul, sejahtera dan aman.

Misi

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berkarakter religius untuk mampu bersaing secara regional dan nasional

1. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah
3. Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan
4. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius , demokratis, dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram
5. Meningkatkan kapasitas aparat dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas .

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Gilireng

4.2.1 Sejarah Kecamatan Gilireng

Gilirang merupakan nama awal yang kemudian bermetamorfosis kembali menjadi Gilireng. Kecamatan ini dulunya adalah sebuah kampung yang terletak di ujung utara Kabupaten Wajo. Akibat perkembangan zaman sekarang Gilireng telah menjadi Ibukota Kecamatan. Gilireng kaya akan potensi alam, mulai dari hasil hutan sampai sumber daya alam gas yang terkandung di dalam perut bumi Gilireng ada juga kekayaan budaya yang selalu dilestarikan oleh masyarakat Gilireng yakni *Maddita Petta Manurung* dan *Petta Cakkuridi*.

Menurut pendapat Pemuka masyarakat di Gilireng, awal mula munculnya nama Gilireng itu bermula pada zaman penjajahan Belanda. Gilireng adalah sebuah wilayah yang belum pernah dimasuki oleh penjajah Belanda. Pada saat itu yang memerintah di Gilireng adalah Datu Gilireng (Andi Bau Beddu). Beliau mendengar kabar bahwa para penjajah akan masuk ke Gilireng. Maka dari itu, Datu Gilireng memerintahkan kepada masyarakat Gilireng untuk menjaga di perbatasan kampung agar para penjajah tidak masuk ke wilayah Gilireng. La Paddaga, seorang pemberani yang memimpin para pejuang waktu itu untuk menahan agresi penjajah. Para berjuang terus bertahan dengan bambu runcing, karena

terdesak akibat persenjataan yang tidak seimbang makanya sebagian pejuang dan masyarakat Gilireng berupaya melarikan diri. Tapi La Paddaga dengan perkasa berteriak penuh semangat, "*Giling Ko!*" artinya berbaliklah. Kata-kata *Giling Ko* menjadi pelecute semangat para pejuang untuk berbalik melawan kembali para Penjajah Belanda. Akibatnya dengan persenjataan seadanya para pejuang dan masyarakat Gilireng berhasil memukul mundur para penjajah sehingga tidak memasuki wilayah Gilireng. *Giling ko* menjadi "*Gilireng*" yang artinya berbaliklah. Akhirnya orang - orang menyebutnya "*Gilireng*".

4.2.2. Luas Wilayah Kecamatan Gilireng

Luas Wilayah Kecamatan Gilireng sekitar 147 km², terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 Desa, 2 Lingkungan dan 20 Dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Kabupaten Sidrap dan Kecamatan Keera
- Sebelah Timur :Kecamatan Majauleng
- Sebelah Selatan :Kecamatan Majauleng dan Maniangpajo
- Sebelah Barat :Kecamatan Maniangpajo

Peta Wilayah Kecamatan Gilireng dapat dilihat pada lampiran. Adapun jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Gilireng yakni 9 dengan jumlah Desa 8 dan 1 Kelurahan yakni Kelurahan Gilireng. Berikut disajikan luas wilayah menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Gilireng dalam tabel 4.

**Tabel 4. Luas wilayah menurut Desa/ Kelurahan di kecamatan
Gilireng, 2015**

Desa/ Kelurahan	Luas Area (Km²)	Persentase
1. Lamata	20.26	13.78
2. Poleonro	8.17	5.56
3. Mamminasae	14.14	10.2
4. Abbatireng	9.23	6.26
5. Polewalie	11.2	7.62
6. Gilireng	6.65	4.52
7. Alausalo	12	8.16
8. Arajang	20.3	13.81
9. Paselloreng	44.05	29.97
GILIRENG	147,00	100,00

Sumber Data: Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Berdasarkan Data yang disajikan pada tabel 4, Desa Paselloreng merupakan Desa dengan wilayah terluas yaitu 44,05 km² yang ada di Kecamatan Gilireng. Sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kelurahan Gilireng dengan Luas 6,65 km² yang sekaligus menjadi Ibukota Kecamatan.

Tabel 5. Posisi dan tinggi wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng,2015

Desa/ Kelurahan	Garis Lintang Latitude (°)	Garis Bujur Longitude (°)	Ketinggian dari Permukaan Laut
1. Lamata	3.94.91	120.131	72
2. Poleonro	3.961	120.1589	49
3. Mamminasae	3.953	120.1893	36
4. Abbatireng	3.9455	120.1721	49
5. Polewalie	3.9284	120.1572	54
6. Gilireng	3.9359	120.1774	44
7. Alausalo	3.9314	120.1849	36
8. Arajang	3.8919	120.1703	83
9. Paselloreng	3.8688	120.1682	48
GILIRENG	3.9369	120.1744	44

Sumber Data : Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Posisi dan tinggi wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng berada pada ketinggian dari Permukaan Laut yaitu 44 meter dan berada pada Garis Lintang 39369° sementara itu Garis Bujur Kecamatan Gilireng 120,1744°.

Tabel 6. Jarak dari Kantor Desa/Kelurahan Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan di Kecamatan Gilireng (km),2015

Desa/Kelurahan	Jarak Ke Ibukota Kecamatan (km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1. Lamata	6,00	31
2. Poleonro	3,00	32
3. Mamminasae	5,00	34
4. Abbatireng	2,00	33
5. Polewalie	0,80	32
6. Gilireng	0,00	35
7. Alausalo	1,00	36
8. Arajang	5,00	35
9. Paselloreng	10,00	38

Sumber Data : Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 6, jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke ibukota Kabupaten di Kecamatan Gilireng, Desa Paselloreng merupakan Desa dengan jarak yang paling jauh dari ibukota Kecamatan dengan jarak 10 km² begitupun dengan jarak keibukota kabupaten sekitar 38 km². Dan Desa yang terdekat dari ibukota Kabupaten adalah Desa Lamata dengan jarak 31 km².

4.2.3. Pemerintahan

Kecamatan Gilireng merupakan kecamatan Tipe A dengan beban kerja yang besar. Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 5 seksi, sekretariat terdiri dari 3 subbagian. Banyaknya beban kerja yang dilaksanakan merupakan dampak dari banyaknya potensi masyarakat dan desa yang harus dikembangkan. Di Kecamatan Gilireng, klasifikasi desa terbagi atas Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Berikut pembagian klasifikasi Desa Swakarya dan Swasembada menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng pada tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi Desa atau Kelurahan Menurut administrasinya di Kecamatan Gilireng,2015

Desa/ Kelurahan	Klasifikasi	Administrasi
1. Lamata	Swakarya	Desa
2. Poleonro	Swakarya	Desa
3. Mamminasae	Swakarya	Desa
4. Abbatireng	Swakarya	Desa
5. Polewalie	Swakarya	Desa
6. Gilireng	Swasembada	Kelurahan
7. Alausalo	Swakarya	Desa
8. Arajang	Swakarya	Desa
9. Paselloreng	Swakarya	Desa

Sumber Data : Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Adapun ciri Desa Swakarya adalah Adat-istiadat

masyarakatnya sedang mengalami perubahan (transisi), Pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berpikir, Mata pencarian penduduknya mulai beraneka ragam, tidak hanya pada sektor agraris, Lapangan kerja bertambah dan produktivitas meningkat diimbangi dengan makin bertambahnya prasarana desa sementara itu Swadaya masyarakat dengan cara gotong royong telah efektif dan mulai tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun desanya roda pemerintahan desa mulai berkembang baik dalam tugas maupun fungsinya masyarakat desa telah mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri dan Bantuan pemerintah hanya bersifat sebagai stimulasi saja.

Sedangkan Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Swasembada berlokasi di sekitar ibukota kecamatan, di sekitar ibukota kabupaten, dan di sekitar ibukota provinsi, yang tidak termasuk ke dalam wilayah kelurahan sementara itu semua keperluan hidup pokok swasembada dapat disediakan oleh desa tersebut dan Alat-alat teknis yang digunakan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah lebih modern dibandingkan dengan alat-alat yang digunakan penduduk desa tradisional, swadaya, dan swakarya. Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang ada sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya mata pencaharian penduduknya sudah beraneka ragam, sebagian besar penduduknya bergerak di bidang perdagangan

saja, Pada desa swasembada, sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya satu Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai Swasembada yaitu Kelurahan Gilireng sementara itu dari ke delapan Desa masih di Klasifikasikan sebagai Swakarya.

4.2.4. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berikut digambarkan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng, 2014, dan 2015.

Desa/ Kelurahan	<u>Jumlah Penduduk</u>		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2014-2015
	2014	2015	
1. Lamata	1,800	1825	1,37%
2. Poleonro	945	974	2,98%
3. Mamminasae	663	678	2,21%
4. Abbatireng	882	893	1,23%
5. Polewalie	807	803	0,50%
6. Gilireng	1,435	1441	0,42%
7. Alausalo	683	690	1,01%
8. Arajang	1867	1893	1,37%
9. Paselloreng	2570	2588	0,70%
GILIRENG	11652	11785	1,14%

Sumber Data : Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Penduduk Kecamatan Gilireng berdasarkan pada table 8 sebanyak 11785 Jiwa yang terdiri atas 5717 jiwa penduduk laki-laki dan 6.068 jiwa

penduduk perempuan. Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk tahun 2014, Penduduk Kecamatan Gilireng mengalami Pertumbuhan sebesar 1,14 Persen. Berikut disajikan distribusi kepadatan penduduk di Kecamatan Gilireng pada tabel 9.

Tabel 9. Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut desa atau Kelurahan di Kecamatan Gilireng, 2015

Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km²
1. Lamata	15,49	90
2. Poleonro	8,26	119
3. Mamminasae	5,75	45
4. Abbatireng	7,58	97
5. Polewalie	6,81	72
6. Gilireng	12,22	217
7. Alausalo	5,85	58
8. Arajang	16,07	93
9. Paselloreng	21,97	59
GILIRENG	100,00	80

Sumber Data : Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Kepadatan penduduk dapat dilihat di tabel 9 yang ada di Kecamatan Gilireng tahun 2015 mencapai 80 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 8 orang. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Paselloreng 21,97 persen.

4.2.5.Sosial

a. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan cukup, Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas Guru dan jumlah sarana sekolah tingkat Dasar.

Tabel 10. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Desa atau Kelurahan yang di Kecamatan Gilireng, 2015

Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Lamata	2	160	17	9,41
2. Poleonro	1	116	8	14,50
3. Mamminasae	2	148	21	7,05
4. Abbatireng	1	60	8	7,50
5. Polewalie	2	86	17	5,06
6. Gilireng	2	187	24	7,79
7. Alausalo	1	80	10	8,00
8. Arajang	2	112	17	6,59
9. Paselloreng	3	259	25	10,36
GILIRENG	16	1206	147	8,22

Sumber Data: Diknas Kecamatan Gilireng, 2017

Sekolah Dasar pada Tabel 10 berjumlah 16 sekolah Dasar yang menampung 1206 murid, dan Guru sekolah Dasar 147 Guru adapun Rasio Murid Guru sekitar 8,22. Sementara Sekolah Menengah Pertama

berjumlah 5 Sekolah yang menampung 419 Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama 58 Guru dengan Rasio Murid Guru 7,22 Berikut disajikan Jumlah sekolah, murid, Guru dan Rasio Guru Murid di kecamatan Gilireng Pada tahun 2015.

b. Agama

Mayoritas Agama yang dianut oleh Masyarakat di Kecamatan Gilireng adalah Agama Islam dengan jumlah 11779 Jiwa dan yang menganut Agama Protestan dengan jumlah 7 Jiwa yang bertempat tinggal di Kelurahan Gilireng. Berikut pembagian jumlah tempat peribadatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng dalam tabel 11.

Tabel.11 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Gilireng, 2015

Desa/Kelurahan	Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1. Lamata	1	1	-	-	-	-
2. Poleonro	1	-	-	-	-	-
3. Mamminasae	2	-	-	-	-	-
4. Abbatireng	1	-	-	-	-	-
5. Polewalie	1	-	-	-	-	-
6. Gilireng	2	1	-	-	-	-
7. Alausalo	2	-	-	-	-	-
8. Arajang	1	1	-	-	-	-
9. Paselloreng	1	-	-	-	-	-
GILIRENG	13	3	-	-	-	-

Sumber Data: Badan Pusat statistik Kabupaten Wajo, 2017

Berdasarkan tabel tersebut Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng terdapat 13 Mesjid dan 3 Mushola, dan di Kecamatan Gilireng tidak terdapat Gereja Protestan, Gereja Katholik dan Vhira.

4.2.6 Visi dan Misi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019

Perumusan Visi dan Misi Jangka Menengah Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Kecamatan Gilireng adalah Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Gilireng melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019

akan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Kecamatan Gilireng baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Adapun kriteria rumusan Visi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gilireng dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan Kecamatan Gilireng, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gilireng; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2014-2019 dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Selanjutnya Visi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan Kecamatan Gilireng (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Perumusan visi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 bersumber dari informasi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo Periode 2014-2019 dan arah pembangunan daerah jangka menengah;

Visi Kecamatan Gilireng dalam Renstra Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 memiliki keterkaitan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2014-2019 yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.

2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gilireng

Pernyataan visi dalam Renstra Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 merespon (merupakan jawaban) atas isu-isu strategis Kecamatan Gilireng.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka Visi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 adalah Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat Kecamatan Gilireng yang berkarakter religius, produktif, unggul, sejahtera dan aman.

Makna pokok yang tersirat dalam visi Kecamatan Gilireng , yaitu :

1. Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan dan mudah;
2. Masyarakat yang berkarakter religius, produktif, unggul, sejahtera dan aman, berarti suatu kondisi masyarakat bersama aparaturnya kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Gilireng selama lima tahun ke depan yang memiliki sikap dan perilaku berbasis kearifan budaya lokal Wajo yang senantiasa dinafasi oleh kehidupan keagamaan yang kuat dan memanifestasikan etos kerja *yassi wajori* dan akhirnya menumbuhkan sikap kemandirian, memiliki dengan daya saing yang tinggi menuju taraf hidup masyarakat yang berada di atas pemenuhan kebutuhan dasar baik dilihat dari kemakmuran ekonomi maupun kesejahteraan

sosial dengan senantiasa dalam lingkup tatanan kehidupan yang tercipta dari pembinaan ketertiban masyarakat.

Misi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kecamatan Gilireng. Rumusan misi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 membantu lebih jelas penggambaran visi Kecamatan Gilireng yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Gilireng. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Kecamatan Gilireng.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Kecamatan Gilireng.

Misi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Gilireng dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Gilireng Tahun 2014-2019.

2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Kecamatan Gilireng telah mengidentifikasi keadaan dan atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi Kecamatan Gilireng benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Berdasarkan analisis di atas, maka Misi Kecamatan Gilireng tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Adapun makna dari misi Kecamatan Gilireng tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi;

Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Gilireng sebagai perangkat teknis kewilayahan harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang didukung oleh aparatur dan kelembagaan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai serta standar pelayanan yang jelas dan transparan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kesemuanya memanfaatkan teknologi informasi.

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Misi ini Kecamatan Gilireng berupaya meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya melalui perencanaan pembangunan, pemanfaatan maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Misi ini juga menitikberatkan pada upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum.

Misi ini bermakna bahwa Kecamatan Gilireng bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum dengan aktif melakukan koordinasi dengan instansi teknis penyedia layanan.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Misi ini bermakna bahwa kualitas lingkungan hidup mendapatkan perhatian yang sangat tinggi mengingat kota Sengkang juga merupakan wilayah utama penilaian adipura. Di samping itu, kebutuhan masyarakat perkotaan akan lingkungan yang sehat semakin tinggi. Misi ini juga mencoba menjawab tantangan pemerintah Kabupaten Wajo yaitu dicanangkannya Kota Sengkang sebagai kota bersih dan sehat.

4.2.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Berdasarkan pada Visi dan Misi Kecamatan Gilireng di atas, maka tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gilireng Tahun 2014 – 2019 adalah:

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi;

Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dan kelembagaan kecamatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas SDM.

Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas data dan informasi desa/kelurahan dan kecamatan

Sasaran 4 : Terciptanya standar pelayanan yang jelas dan lengkap.

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Tujuan : Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan persampahan

Sasaran 1 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kerja bhakti lingkungan

Sasaran 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah.

4.3. Gambaran Umum Desa Abbatireng

4.3.1. Sejarah Desa

Desa Abbatireng berdiri pada tahun 1999 yang sebelumnya merupakan desa persiapan pada tahun 1993. Hal ini disebabkan Kecamatan Gilireng masih masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Maniangpajo yang baru resmi dimekarkan pada tahun 1999. Berikut disajikan nama Kepala Desa Abbatireng dimulai dari berdirinya hingga sekarang.

Tabel 12. Sejarah Pemerintahan Desa dan Nama-nama Kepala Desa
Sejak berdirinya Desa Abbatireng

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1999-2003	Abdul Salam, B. Sc	-
2	2003-2008	Abdul Salam, B. Sc	-
3	2008-2014	H. A. Sampewali	-
4	2015-2021	H. A. Sampewali	-

Sumber Data : Kantor Desa Abbatireng, 2017

Pada tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa sejak di bentuknya Desa Abbatireng hingga sekarang terdapat dua nama Kepala Desa yang sudah menjabat. di Desa Abbatireng pada tahun 1999-2008 di jabat oleh Kepala Desa yang bernama Abdul Salam, B. Sc dan pada tahun 2008 sampai sekarang kepala Desa Abbatireng bernama H.A.Sampewali.

Tabel 13. Proses Peristiwa Sejarah di Desa Abbatireng

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1993	Terbentuknya Desa persiapan Abbatireng	Transportasi di desa Abbatireng belum layak untuk dilalui oleh alat transportasi desa.
1995	Terbentuknya Desa Definitif Desa Abbatireng.	Pendapatan masyarakat berkurang karena seringnya gagal panen.
1999	Terjadinya pemekaran dari Kecamatan maniangpajo menjadi kecamatan gilireng.	Terjadi banjir yang mempengaruhi aktivitas masyarakat.
2000	Dibangunnya Kantor Desa yang masih sederhana dengan ukuran 4 x 6 m	Sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai.
2002	Dibangunnya Kantor Desa yang permanen dengan swadaya masyarakat desa Abbatireng	Tidak dapat dinikmati oleh masyarakat . Pompanisasi belum optimal
2008	Pemilihan kepala desa yang baru periode 2008-2014	Kemarau berkepanjangan yang melumpuhkan kegiatan perekonomian
2010	Pembagian gas 3 Kg	Pemadaman listrik secara bergilir, jalan becek karena musim hujan

Sumber Data : Kantor Desa Abbatireng, 2017

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1993 merupakan proses persiapan terbentuknya Desa Abbtireng namun pada proses terbentuknya Desa Abbatireng tidak lepas dari hambatan yakni Transportasi di Desa Abbatireng belum layak untuk dilalui oleh alat transportasi Desa dan pada tahun 1995 terbentuklah Desa yang bernama Desa Abatireng yang dulunya berada di wilayah Kecamatan Maniangpajo pada saat itu Pendapatan masyarakat berkurang karena seringnya gagal panen.

Pada tahun 1999 terjadinya pemekaran dari Kecamatan Maniangepajo menjadi Kecamatan Gilireng, namun hal tersebut mengalami kejadian yang buruk dimana pada saat pemekaran tersebut terjadi banjir yang menghambat aktifitas masyarakat, selang berapa tahun untuk pertama kalinya Desa Abbatireng mendapatkan bantuan Pembagian gas 3 Kg dari pemerintah namun di sisi lain terjadi Pemadaman listrik secara bergilir, jalan becek karena musim hujan, sejarah kejadian yang ada di Desa Abbatireng pada tahun 1993 hingga tahun 2008 tidak terlepas dari kejadian yang buruk menimpa masyarakat setempat .

4.3.2. Kondisi Desa

a. Geografis

Desa Abbatireng terletak +/-33 Km dari Ibukota Kabupaten Wajo, atau +/-3 Km dari Ibukota Kecamatan Gilireng dengan luas wilayah $\pm 9,23 \text{ Km}^2$, Peta Admistrasi Wilayah Desa Abbatireng dapat dilihat pada lampiran dan batas-batas Desa Abbatireng sebagai berikut :

Sebelah Utara	:Berbatasan Dengan Kelurahan Gilireng
Sebelah Timur	:Berbatasan Dengan Desa Mamminasae
Sebelah Selatan	:Berbatasan Dengan Desa Poleonro
Sebelah Barat	:Berbatasan Dengan Desa Polewalie

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Abbatireng terdiri dari Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

c. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk di Desa Abbatireng sebanyak 893 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Abbatireng tergolong rendah. Tingkat pendidikan digolongkan kedalam tingkatan SD, SMP, SMA dan Sarjana serta terdapat masyarakat yang tidak bersekolah. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 105 orang, SMP sebanyak 70 orang, SMA sebanyak 105 orang dan Sarjana sebanyak 55 orang. Selebihnya penduduk di Desa Abbatireng tidak bersekolah.

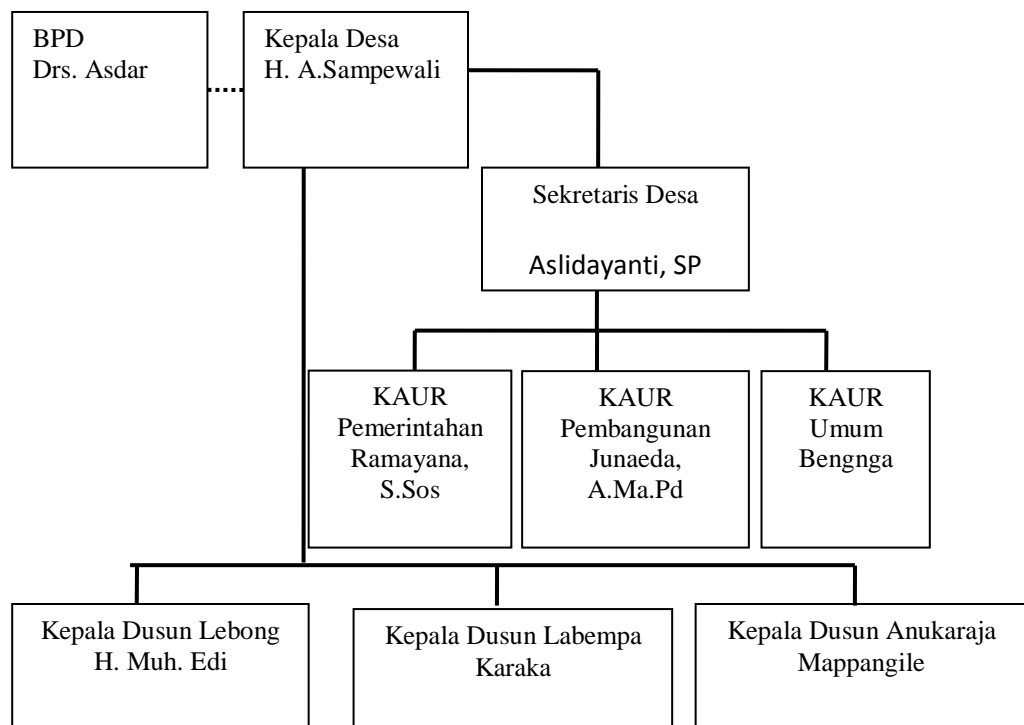
d. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat yang ada di Desa Abbatireng mayoritas Petani yang berjumlah 341 orang, dan untuk kaum perempuan untuk membantu perekonomian keluarga berprofesi sebagai penunun sebanyak 100 orang dan pedagang sebanyak 15 orang. Disisi lain di Desa Abbatireng juga terdapat PNS sebanyak 69 orang dan karyawan sebanyak 157 orang. Penduduk yang tidak terdata selebihnya tidak mempunyai mata pencaharian.

4.3.3. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Berikut Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Gambar 2. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa



Bagian Struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APB Desa;

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-buktipenerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan.

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

- a. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatan;
- b. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam BukuPembantu Kas Kegiatan;

- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- d. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atasbeban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu SekretarisDesa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum,Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukanantara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- c. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung Jawaban.

4.3.4 . Visi dan Misi Desa Abbatireng

Visi Pembangunan Desa Abbatireng merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Wajo, substansi RPJMD Kabupaten Wajo, dinamika lingkungan strategis,

aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Abbatireng, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Abbatireng untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Desa Abbatireng sebagai Desa yang Mandiri menuju Masyarakat Madani ”

M i s i

Desa Abbatireng mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2015-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDM dan SDA yang optimal
2. Menciptakan SDM yang Beriman dan Bertaqwa
3. Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat

4.4. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Sebelum Merencanakan Alokasi Dana Desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya Dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Wajo ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Wajo. Sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Wajo. Alokasi Dana Desa Minimal sebesar 60% dan alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 40%. Alokasi Dana Desa Proporsional di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Perhitungan Alokasi Desa Proporsional setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $ADDP \text{ setiap Desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2)(0,10 \times Z3)(0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ Kabupaten Wajo} - ADDM)$

Keterangan :

ADDP Setiap Desa = Alokasi Proporsional setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Wajo.

Z2 = Rasio jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten Wajo.

Z3 = Rasio Luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten wajo

Z4 = Rasio IKG Kabupaten Wajo terhadap total IKG Kabapaten Wajo

ADDKab = Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Wajo

ADDMKab = Besaran Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten Wajo

Tabel 14. Gambaran Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Wajo TA. 2016.

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	DANA BAGI HASIL (DBH)	105.663.173.000.00	85.027.890.106.00
2	DAU	722.487.872.000.00	722.487.872.000.00
	TOTAL DBH + DAU	828.151.045.000.00	807.515.762.106.00
	DAK (BELANJA MENGIKAT)	254.384.637.000.00	223.773.808.682.00
3	TOTAL DANA PERIMBANGAN	1.082.535.682.000.00	1.031.289.570.788.00
4	ALOKASI DANA DESA (ADD)	36.636.377.645.00	36.636.377.645.00
5	GAJI (BELANJA WAJIB)	490.479.343.735.00	449.741.394.379.00
6	ADD DESA ABBATIRENG	211.632.128,00	211.632.128,00

Sumber : BPKD Kaputen Wajo, 2017

Catatan :

Peruntukan Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan dana perimbangan setelah dikurangi belanja wajib dan belanja mengikat adalah sebesar 10,24%.

4.4.1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun Lebong H.Muh Edi yang mengatakan

"1- 2 bulan sebelum MusrenbangDesa kami kepala dusun mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama perangkat Desa mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survei terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan Hibah" (Hasil Wawancara, 26 Januari 2016)

Sebelum melaksanakan MusrenbangDesa, Pemerintah Desa membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu,

Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangDesa. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Abbatireng H. A. Sampewali bahwa :

“Sebelum melakukan MusrenbangDesa pertama-tama semua kepala Dusun yang ada di Desa Abbatireng melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah itu, Kepala Dusun Melaporkan hal-hal yang di inginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat MusrenbangDesa” (Hasil Wawancara, 25 Januari 2017)

Melaksanakan MusrenbangDesa Pemerintah Desa melakukan Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Karaka, Kadus Labempa bahwa:

“Pada saat ingin dilaksankannya MusrenbangDesa kadus melakukan rapat perdusun kemudian pra rapat bersama kades dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan Apbdes, nanti pada saat musrebangdes di tawarkan sama masyarakat hal yang ingin di laksanakan.”(Hasil Wawancara 21 Januari)

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbangdesa, apakah masyarakat Desa Abbatireng sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) Salah satu informan yang berasal dari Perangkat Desa, Bengga mengatakan bahwa “Semua masyarakat yang ada di Desa Abbatireng sudah tau, kalau Pemerintah Desa mendapatkan Dana ADD” (Hasil Wawancara, 13 Februari 2017)

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Labempa, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai

Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa :

“Saya tau kalau pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan dari Kabupaten yang di sebut ADD dan Biasanya kalau ada kegiatan dikantor Desa seperti Musrenbang kita di undang, ada perangkat desa yang bawa undangan dirumah, tapi tidak tau untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya”
(Hasil Wawancara, 27 Januari 2017)

Sementara itu, di tempat yang terpisah juga melakukan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Anukaraja, Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa:

“Saya biasa dengar tapi kurang tau apa yang di maksud ADD, Kalau untuk pemberitahuan kepada masyarakat biasanya ada dari perangkat Desa yang umumkan di mesjid pada saat sudah sholat jum’at” (Hasil Wawancara 27 Januari 2017)

Pelaksanaan dalam Kegiatan Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ADD, Hal ini diterangkan oleh Narasumber, H.A.Sampewali bahwa :

“Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ada Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa untuk lebih jelasnya ada di SK pembentukan TPK” (Hasil Wawancara, 25 Januari 2017)

Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa, Tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini di terangkan oleh Ramayana bahwa :

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga Pasar di situlah kita bahas berapa anggaran yang di

gunakan untuk pembangunan misalnya pembangunan jalan Tani memerlukan berapa anggaran”(Hasil Wawancara, 26 Januari 2017)

Proses MusrenbangDesa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sekertaris Desa abbatireng, Anwar yang mengatakan :

“Pada saat Musrenbang Desa, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh pak camat, pak desa pemimpin MusrenbangDesa, disitumi diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nanti diusulkan dikecamatan “ (Hasil wawancara,26 Januari 2016).

Wawancara yang terpisah yang di lakukan dengan Ketua BPD Desa Abbatireng memberikan keterangan bahwa, pada saat MusrenbangDesa Pemimpin Musyawarah dalam hal ini Kepala Desa menerima usulan dari masyarakat, Dalam Pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir MusrenbangDesa maka racangan tersebut di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa tahun yang berjalan .

Hal tersebut diterangkan oleh Asdar selaku Ketua BPD Desa Abbatireng, mengatakan :

“Dalam pelaksanaan MusrenbangDesa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir MusrenbangDesa. Dalam penyusunan RKPDesa yaitu mendegarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh peserta MusrenbangDesa, setelah itu racangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa

paling lambat akhir bulan September tahun berjalan” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2017) “

Kegiatan selanjutnya dalam proses Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dalam RPD Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Abbatireng, Junaeda mengatakan :

“Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa” (Hasil Wawancara, 25 Januari 2017) .

Berdasarkan pada hasil MusrenbangDesa, Pemerintah Desa harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran Dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun. Hal ini di terangkan oleh Ramayana sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ADD, bahwa :

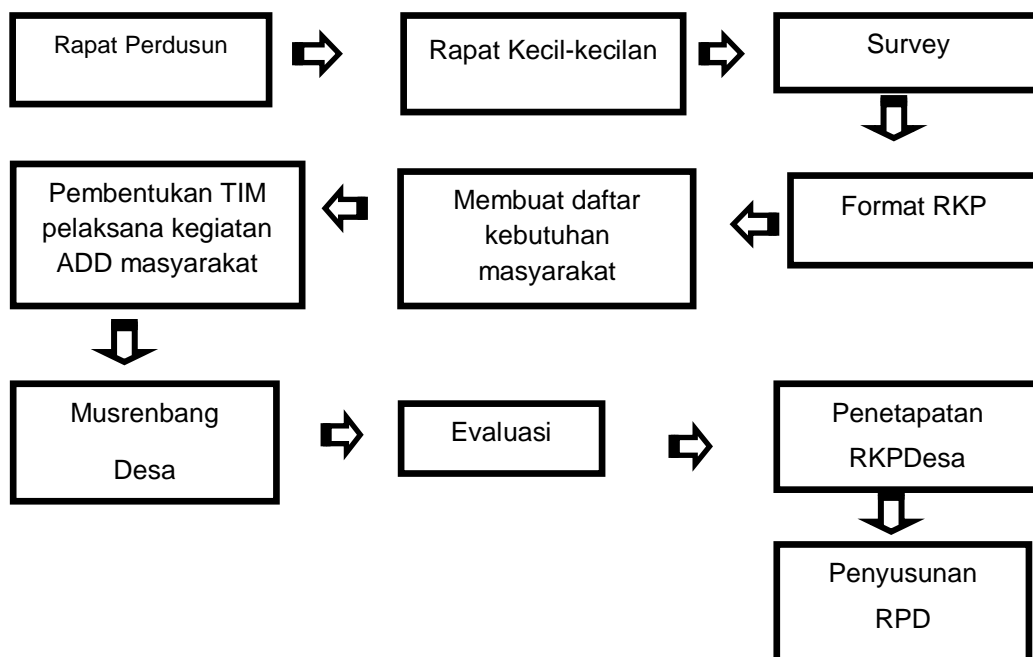
“Hasil dari MusrenbangDesa harus di buatkan RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, RKPDesa itu rencana Kerja pembangunan Desa yang jangka waktunya 1 tahun” (Wawancara, 26 Januari 2017)

Wawancara juga dilakukan dengan Mantan Sekertaris Desa Abbatiireng yang sekarang menjabat Sebagai Ketua PMD Desa Abbatiireng, Anwar menyatakan bahwa:

“Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Peggunaan Dana (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa (Wawancara, 26 Januari 2017)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut.

Gambar 3 . Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatiireng.



MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Abbatireng telah di sepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum MusrenbangDesa, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Abbatireng telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).

Merujuk pada Gambar 3. Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Abbatireng menghasilkan program kerja pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunan Pos kamling 1 unit di Dusun Anukaraja Rp. 10.794.000, Rehad Teluk Cekdam-Embung di Dusun Anukaraja Rp. 4.500.000, Pembangunan kantor pagar Desa Abbatireng 32 Meter 37.112.600, Rehab parkir motor Rp. 5.125.951 dan pemeliharaan pagar kantor Desa Abbatireng Rp. 6.400.000.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebanyak Rp. 63.139.345 dari keseluruhan jumlah ADD yang di terima Desa Abbatireng adalah Rp. 211.632.128,00. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp.148.492.783 di pergunakan untuk biaya Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD,

Tunjangan imam Desa, imam Dusun dan Guru mengaji , Tunjangan bendahara desa, Operasional pemerintah Desa, Peralatan/ perlengkapan kantor, dan Operasional lembaga kemasyarakatan.

Matriks 1. Hasil Analisis Terhadap Tahapan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng

No (1)	Tahapan (2)	Aktor/ Pemeran (3)	Analisis (4)
1.	Rapat Perdusun	Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan Masyarakat	Proses perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum.
2.	Rapat Kecil-kecilan	Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa	Rapat yang dilaksanakan sudah melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa
3.	Survey	Kepala Desa dan Kepala Dusun	Pemerintah Desa Abbatireng melakukan Survey terlebih dahulu sebelum membuat Surat Keterangan Hibah.
4.	Format RKP	Pemerintah Desa	Format RKP dibuat oleh Tim penyusun RKP yang telah ditentukan oleh Kepala Desa
5.	Membuat daftar kebutuhan masyarakat	Pemerintah Desa	Dalam membuat daftar kebutuhan masyarakat Pemerintah Desa sudah mengacu pada rapat perdusun
6.	Pembentukan TIM pelaksana kegiatan ADD	Kepala Desa	Kepala Desa membentuk TPK ADD sesuai dengan Peraturan yang ada
7.	MusrenbangDesa	Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.	Pemerintah Desa mempunyai kesulitan dalam menentukan Program yang dilaksanakan .
8.	Evaluasi	Kepala Dusun, Masyarakat, BPD, LPMD	Dilakukan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan program
9.	Penetapan RKPDesa	Kepala Desa dan BPD	Dilaksanakan apabila sudah disepakati
10.	Penyusunan RPD	Tim Pelaksana Kegiatan	RPD yang disusun sudah berdasarkan peraturan Desa tentang APBDDesa dan data harga Pasar .

Sumber : Analisis Data Primer, 2017

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADD di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

4.4.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Wajo mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Wajo tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk Teknis tentang Aloksi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Wajo. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Abbatireng, H.A. Sampewali :

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana

kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat” (Wawancara 25 Januari 2017)

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Abbatireng mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di Dusun Labempa yang mengatakan bahwa:

“Dari segi Perencanaan Musrenbang Desa Desa Abbatireng menurutku sebagai formalitas saja karena semua yang mau na kerjakan sudah memang mi na sepakati bersama, jadi mauki bicara tidak enak mi, yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja, apa lagi program yang na laksanakan selalu sama setiap tahunnya, baru banyak yang lebih penting daripada itu” (Hasil Wawancara, 22 Januari 2017)

Pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa lebih cenderung mengutamakan Dusun tertentu. Hal tersebut di peroleh dari informan yang berasal dari Dusun Lebong, bahwa :

“Pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa kebanyakan di Dusun Anukaraja, padahal kita juga di dusun Lebong butuh Cekdam” (Hasil wawancara, 23 Januari 2017)

Masyarakat berharap Pemerintah Desa memiliki BUMDES, hal tersebut di terangkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun Labempa, Bahwa : “Kami sebagai masyarakat biasa, khususnya yang tidak punya pekerjaan berharap Pemerintah Desa memiliki BUMDes seperti bengkel” (Hasil Wawancara 2 Februari 2017)

Hal senada juga di utarakan oleh salah satu masyarakat yang berada di Dusun Lebong bahwa :

“Semoga untuk tahun depan Pemerintah Desa membuat GOR (Gedung Olahraga), agar masyarakat yang ingin berlatih ada tempat untuk latihan, apalagi selama ini kalau kita mau latihan khususnya volly atau Bulu tangkis tidak ada tempat. karena potensi masyarakat Desa Abbatireng dalam bidang olahraga cukup baik, Apalagi kalau ada pertandingan sangat antusias untuk mengikuti” (Hasil Wawancara, 2 Februari 2017).

Terkait dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yang berharap Pemerintah Desa Abbatireng memiliki BUMDes, maka Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Desa Abbatireng yang diwakili oleh Bendahara Desa, Junaeda mengatakan bahwa :

“Khusus untuk BUMDES di tahun 2016, memang kami belum memiliki dikarenakan belum mengetahui bagaimana cara mengelolanya, kami baru saja mengikuti pelatihan sosialisasi dan penyusunan BUMDES yang di adakan oleh pihak Dinas PMD. Nanti Tahun 2017 Insha Allah. apalagi sudah ada instruksi dari PMD bahwa setiap Desa harus memiliki BUMDES” (Hasil Wawancara, 2 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, di sisi lain Pemerintah Desa Abbatireng juga mendapat respon yang Positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Abbatireng selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun Anukaraja, Supu mengatakan :

“Biasanya kalau ada pembangunan yang di laksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan ” (Hasil Wawancara 2 Februari 2017)

Pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng sudah sangat bagus di bandingkan dengan Desa yang ada di Kecamatan

Gilireng. Hal tersebut diperoleh penulis dengan melakukan Wawancara dengan salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Lebong , Dahniar mengatakan bahwa :

“Pembangunan di Desa Abbatireng sangat bagus, di banding desa yang ada di Kecamatan Gilireng karena kita mempunyai kepala Desa yang betul-betul ingin melihat Desanya meningkat” (Hasil Wawancara 2 Februari 2017)

Di tempat yang terpisah, Kepala Dusun Lebong mengatakan jika pembangunan di tahap pertama belum rampung, maka di alihkan ke tahap berikutnya. H.Muh Edi mengatakan bahwa :

“Jika pembangunan di tahap pertama tidak terlaksana / tidak rampung, maka dialihkan ketahap kedua ”(Hasil Wawancara, 26 Januari 2017).

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua PMD Desa Abbatireng, jika Dana di tahap pertama tidak mencukupi, maka menggunakan Dana pembangunan yang tahap kedua. Anwar mengatakan bahwa :

“Biasanya kalau pembangunan di tahap pertama belum selesai, terus dananya tidak mencukupi kita menggunakan sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti pada saat Pertanggung Jawaban pintar pintarnya Bendahara Desa dan sekertaris Desa mengkalkulasi, yang penting tidak ada penyalahgunaan dana, kalau masalah seperti ini bisa karena untuk kepentingan kita bersama “(Hasil Wawancara, 26 Januari 2017)

Sejalan dengan pendapat tersebut, di tempat yang terpisah Hasil Wawancara dengan Asdar selaku ketua BPD Desa Abbatireng, bahwa dalam melakukan pembangunan jika Dana tersebut tidak cukup Kepala Desa Abbatireng menggunakan Dana tahap kedua atau uang Pribadi.

“Untuk melihat pembagunan di Desa Abbatireng tidak perlu di ragukan lagi, sebab Kepala Desa sangat loyal demi kelancaran pembangunan yang ada di desa bahkan jika dana tersebut belum cair Pak Desa menggunakan uang Pribadinya sendiri dan jika Dana tidak cukup gaji untuk bulan selanjutnya pak desa tidak terima, tapi di sumbangkan ke pembagunan tersebut”
(Hasil Wawancara, 1 Februari 2017)

Terkait dengan Pelaksanaan ADD untuk melihat bagaimana penggunaanya. Dalam Perbup Kabupaten Wajo nomor 2 tahun 2016 Pasal 11 Penggunaan dan Pelaksanaan ADD terdiri atas :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, BPD lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - b. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Balanja aparatur dan operasional pemrintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diperguanakan untuk biaya :
 - a. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Tunjangan imam Desa, imam Dusun dan Guru mengaji
 - d. Tunjangan bendahara desa
 - e. Operasional pemerintah desa meliputi :
 - Belanja ATK, Materai Cetak dan penggandaan
 - Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik
 - Belanja jasa informasi (koran/majalah)

- Belanja makan minum harian dan Rapat
- Belanja jasa informasi (koran/majalah)
- Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- Belanja jasa kebersihan kantor
- Belanja jasa perbaikan peralatan kantor

f. Operasional BPD meliputi :

- Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
- Belanja makan minum harian dan Rapat
- Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah

g. Operasional lembaga kemasyarakatan meliputi :

- Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
- Belanja makan minum harian dan Rapat

h. Peralatan/ perlengkapan kantor

i. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

3. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,b,c dan d ditetapkan dengan keputusan bupati
4. Besarnya biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e maksimal 10% dari jumlah ADD.
5. Besarnya Biaya Operasional BPD sebagaimana di maksud ayat (2) huruf f maksimal 5% dari jumlah ADD

6. Besarnya Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g maksimal 2% dari jumlah ADD
7. Besarnya dana untuk pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa dengan pagu Anggaran maksimal 5% jumlah ADD
8. Biaya untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf l digunakan sebagai atau seluruhnya untuk pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.15.000.000,-
9. Belanja pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
 - c. Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan
 - d. Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan
 - e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - f. Pengembangan tata desa dan teknologi tepat guna
 - g. Perbaikan pendidikan dalam skala kecil
 - h. Pengembangan system informasi pembangunan desa
 - i. Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik

- j. Biaya jaminan kesehatan bagi Pemerintah Desa\
- k. Pengembangan social budaya
- l. Kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan system kelompok
- m. Penguatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelembagaan desa

10. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain (gambar) yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat Penanggung Jawab, Jenis Pekerjaan, Volume, Lokasi, Jumlah Dana, Sumber Dana, Tenaga Teknis/ Konsultan dan Pelaksana.
- c. Biaya untuk penyusunan RAB dan desain sebagaimana dimaksud poin b oleh konsultan atau tenaga teknis mengacu pada peraturan bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang Jasa di Desa.
- d. Setiap pembangunan fisik mengalokasikan, pembuatan prasasti pada RAB masing-masing kegiatan

- e. Prasasti sebagaimana yang dimaksud pada huruf di buat secara permanen dengan ukuran $\pm 50 \text{ Cm}^2$ yang menggambarkan jenis.
- f. kegiatan dan sumber anggaran serta tahun pelaksanaan kegiatan tersebut.

11. Pengaturan berkenaan dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

**Matriks 2. Analisis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Abbatiireng**

No	Uraian	Rincian Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kepala Desa 1 Orang - Sekdes 1 Orang - Kaur 3 Orang - Kadus 3 Orang	Rp.70.200.000	- 1 x 12 x 2.100.000 = Rp.25.2000,000 - 1x 12 x 750.000 = Rp. 9.000.000 - 3 x 12 x 500.000 = Rp. 18.000.000 - 3 x 12 x 500.000 = Rp. 18.000.000
2	Penghasilan staf pemerintah Desa - Imam Desa 1 orang - Imam Dusun 3 Orang - Guru Mengaji 3 Orang	Rp.16.200.000	- 1 x 12 x Rp. 300.000= 3.600.000 - 3 x 12 x Rp. 225.000= 8.100.000 - 1 x 12 x Rp. 125.000= 4.500.000
3	Operasional Perkantoran Desa dan Tunjangan Bendahara Desa - Bendahara Desa 1 orang - Belanja alat Tulis kantor - Belanja makan minum rapat - Belanja perbaikan peralatan kantor - Belanja Listrik - Biaya Alat Pembersih kantor - Belanja surat kabar/majalah - Belanja jasa dan kebersihan Kantor Desa - Perjalanan Dinas - Biaya cetak dan penggandaan	Rp.29,510,613	- 1 x 12 x Rp 250.000 = Rp.3.000.000 - Rp. 4,453,564 - Rp. 5.000.000 - Rp. 1.007,149 - Rp.600.000 - Rp. 829.900 - Rp. 600.000 - Rp. 2.120.000 - Rp. 7.000.000 - Rp.1.500.000
4	Peralatan dan perlengkapan kantor - Pengadaan printer Brother 1 unit - Pengadaan Kursi Rapat 14 Buah	Rp.6.400.000	- Rp. 5.000.000 - Rp.1.400.000

Pembayaran tunjangan BPD dan Operasional SPD Belanja Pegawai Tunjangan BPD <ul style="list-style-type: none"> - Ketua 1 orang - Wakil Ketua 1 orang - Sekertaris 1 orang Anggota 2 orang	Rp. 7.440.000	<ul style="list-style-type: none"> - 1x 12 x 150.000 = Rp.1.800.000 - 1x 12 bulan x 140.000 = Rp. 1.680.000 - 1 x 12 Bulan x 130.000 = Rp. 1.560.000 - 2 x 12 bulan x 100.000 = Rp. 2.400.000
Operasioanl BPD	Rp.4.232.643	
Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Bahan Belanja ATK - Belanja makan minum dan rapat - Belanja Perjalanan Dinas 	Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 1.232.643	
Operasional LPMD	Rp.2.500.000	
Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> - Belanja ATK - Belanja makan minum Rapat 	Rp. 2.116.321 Rp. Rp. 1.161.321	
Biaya Pengembangan SDM Aparat Desa	Rp.15.000.000	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pos kamling 1 Unit di Dusun Anukkaraja - Biaya Perencanaan 3% Belanja Modal - Rehad Teluk Cekdam Dusun Anukkaraja - Biaya Perencanaan 3% Belanja Modal - Pembangunan Pagar kantor Desa 32 M - Biaya Perencanaan 3% Belanja Modal - Rehab Parkir Motor - Pemeliharaan Pagar kantor Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 10.794.000 - Rp. 294.000 - Rp. 10.499.100 - Rp.4.500.000 - Rp.135.000 - Rp. 4.365.000 - Rp. 37.112.600 - Rp.1.037.700 - Rp. 36.074.900 - Rp. 5.125.951 - Rp. 6.400.000 	ADD

Sumber : Analisis Data Primier, 2017

Berdasarkan Matriks 2 , Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

4.4.3. Penatausahaan

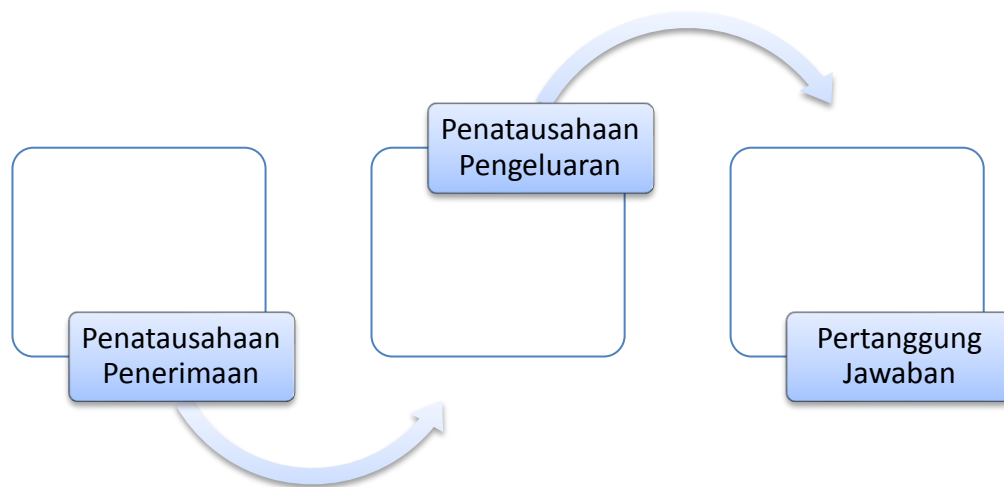
Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tentang pengelolaan keuangan Desa pada pasal 50 tentang Penatausahaan APBDesa pada ayat 2 (Dua) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Abbatireng, H.A.Sampewali menyatakan bahwa : “Setiap Bulan Bendahara Desa Melaporkan Kondisi Keuangan Desa” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2017) .

Berdasarkan Peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan hasil wawancara, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut.

Gambar 4. Alur Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Abbatireng.



Selanjutnya, Proses Penatausahaan Keuangan Desa pada skema 2 secara lengkap disajikan pada matriks 2.

Matriks.3 Hasil Analisis Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Oleh Bendahara Desa

No. (1)	Tahapan (2)	Aktor/ Pemeran Utama (3)	Analisis (4)
1	Penatausahaan Penerimaan	Bendahara Desa	Pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
2	Penatausahaan Pengeluaran	Bendahara Desa	Pencatatan pengeluaran keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
3	Pelaporan Pertanggungjawaban	Kepala Desa dan Bendahara Desa	Setiap bulan Desa melaporkan kondisi keuangan Desa kepada kepala Desa

Sumber : Analisis Data Primer, 2017

Selain tahapan penatausahaan yang di atur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, di tempat yang terpisah wawancara dilakukan dengan Bendahara Desa Abbatireng, Junaeda mengatakan bahwa :

“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”. (Hasil Wawancara, 1 Februari 2017)

Hal tersebut sesuai dengan yang di terangkan oleh Kepala Desa, Abbatireng bahwa Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa. H.A.Sampewali Mengatakan :

“Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku Kas dan bendahara Desa telah telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada ” (Hasil Wawancara 1 Februari 2017)

Sementara di tempat yang terpisah juga dilakukan Wawancara dengan Bendahara Desa Abbatireng, untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan Keuangan Desa. kendala yang dilami pada saat melakukan Penatausahaan adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang

dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut diterangkan oleh, Junaeda bahwa :

“Kendala yang dialami karena baru dilantik tahun lalu, belum mahir menggunakan komputer dan tidak adanya pelatihan khusus untuk Bendahara baru apalagi faktor umur, pada Tahun 2016 ada tawaran dari Mahasiswa untuk mengadakan Pelatihan komputer untuk perangkat Desa tapi tidak di berikan Izin oleh BPMD karena Untuk Dana Pemberdayaan tidak boleh digunakan untuk Aparat Desa, Pelatihan bisa dilaksanakan asalkan di ambil dari dana SDM ” (Hasil Wawancara 25 Januari 2017)

Berdasarkan dari hasil Wawancara tersebut, Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

4.4.4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan

ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Wajo sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Abbatireng

dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Desa Abbatireng, Aslidayanti yang meyakini bahwa :

“Untuk Pengelolaan ADD memang sudah ada Aturannya.biasanya kita pedomani Peraturan Bupati Wajo nomor 2 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Perbup nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari” (Wawancara, 20 Januari 2017).

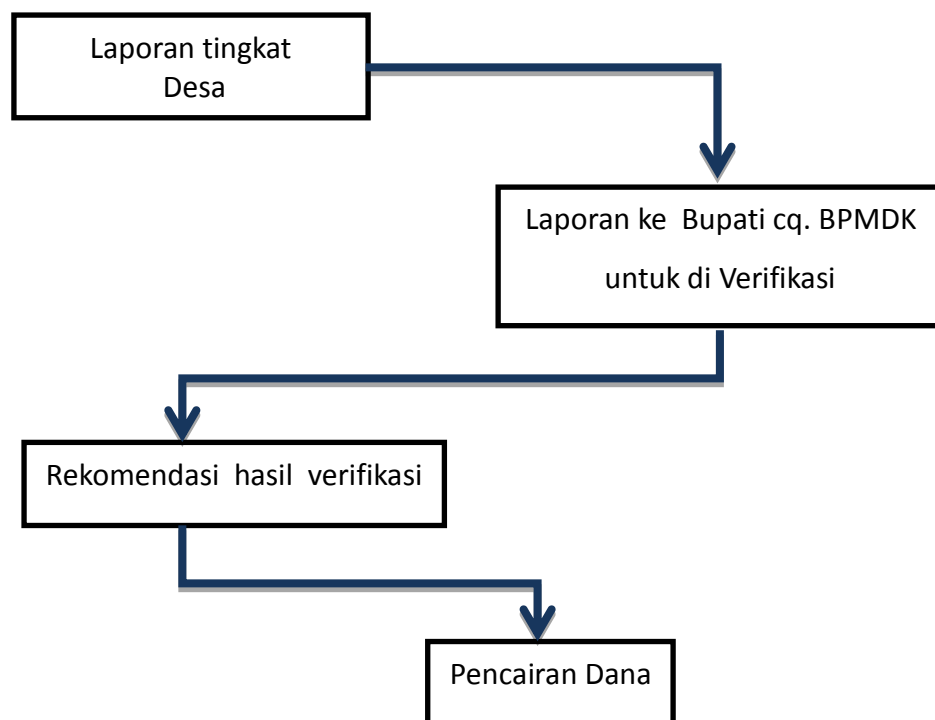
Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan akhir dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, Laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman mengatakan:

“Pelaporan ADD di kerja di desa kemudian verifikasi untuk pencairan nanti masuk di Kecamatan kan di Kecamatan ada di bilang tim pendamping Kecamatan, dan di Kecamatan lah seharusnya berfungsi untuk memferifikasi kemudian di kasi masuk di PMD dan keuangan” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan ADD terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama namun

berbeda pada lampiran laporan. Berikut digambarkan proses pelaporan penggunaan ADD dalam Gambar 5.

Gambar 5. Alur Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)



Poses pelaporan terhadap penggunaan ADD dapat dirangkum secara singkat dalam matrix 4 dengan menjelaskan secara singkat analisis proses dan pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Matriks 4. Hasil Analisis terhadap Pelaporan Penggunaan ADD di Desa Abbatireng.

Jenis Laporan	Proses	Analisis
1.Laporan Berkala	Laporan tingkat Desa	Laporan realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala Desa kepada TIM pendamping kecamatan.
2.Laporan Akhir		
- Pelaksanaan	Laporan ke Bupati cq. BPMDK untuk di Verifikasi	Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan proses pencairan dana terlebih dahulu harus di verifikasi oleh Tim dari BPMDK karena tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan kepada Desa.
- Penyerapan Dana	Rekomendasi hasil verifikasi	Dokumen yang di butuhkan sudah sesuai, maka rekomendasi hasil verifikasi tersebut di bawa ke BPKD untuk melakukan pencairan
- Masalah yang dihadapi	Pencairan Dana	Proses penyampaian laporan penggunaan dana ADD harus tepat waktu , namun pemerintah Desa Abbatireng tidak melaksanakan pelaporan dengan tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang ada karena yang mengetahui cara pembuatannya telah dialihkan ke kantor kecamatan dan di ganti oleh sekretaris Desa yang baru .

Sumber : Analisis Data Primer, 2017

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk BPKD yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran. Untuk Laporan Berkala (Tahap I) disertai dengan lampiran :

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
3. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya
4. LKPJ Akhir tahun pada tahun sebelumnya
5. Peraturan Desa Tentang APBDes tahun berjalan
6. Rencana Penggunaan Dana
7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Tahun Anggaran Sebelumnya.
8. SPTB bermaterai Rp.6.000,- tahap sebelumnya
9. Kwitansi bermaterai RP.6.000,-
10. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa
11. Bebas temuan dari inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.

Sedangkan untuk Surat Permohonan Pencairan ADD Laporan Akhir (Tahap II) disertai dengan lampiran:

1. Rencana Penggunaan Dana
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
3. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-
4. Pertanggung Jawaban Tahap I (Pertama)

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan di

kembalikan ke Desa untuk di sempurnakan. Hal ini sesuai yang di katakana oleh Kepala Desa Abbatireng, H.A.Sampewali bahwa :

“Terkadang dalam proses Pelaporan pernah mengalami kesalahan yang periksa di BPMPDK Kabupaten, karena meskipun dikecamatan menyatakan sudah baik tapi kalau di BPMPDKbilang salah maka harus diperbaiki lagi” (Hasil Wawancara, 25 Januari 2017)

Sementara dalam proses Permohonan Pencairan Dana ADD, jika Admistrasi yang di butuhkan belum memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada Desa terkait, karena fungsi BPMDK sebagai Pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman menyatakan :

“Untuk SPP Desa yang dikembalikan setelah tim kami verifikasi, sudah cocok tidak admistrasi yang kita butuhkan kalau ada yang tidak sesuai kita kembalikan untuk di perbaiki karena fungsi kita sebagai pembinaan beda dengan inspektorat karena dia pengawasan dia mencari apa yang menjadi temuan kalau kita tidak mencari untuk melakukan pembinaan. (Hasil Wawancara 20 Februari 2017)

Pada proses pelaksanaan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), jika Tahap pertama telah di buat SPJ/Laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Hal ini di terangkan oleh Mantan Sekertaris Abbatireng, Anwar bahwa :

“Dalam melaksanakan Pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuat SPJ maka pencairan tahap kedua dilaksanakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan di buat laporan realisasi maka tahap kedua bisa dicairkan” (Hasil Wawancara 26 Januari 2017)

Terkait dengan Proses pencairan di tempat yang terpisah penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman S.Sos mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan tahap pertama masuk tahap kedua, untuk pencairan tahap kedua masuk ketahap pertama. tapi pelaporannya harus tetap di masukkan sebagai administrasi keuangan”
(Hasil Wawancara. 20 Februari 2017)

Sementara itu, Mantan Sekertaris Desa Abbatireng tersebut juga mengatakan bahwa :

“Laporan ADD dibuat tersendiri, karena APBdes itu Di APBdeskan tercover semua sumber dana, ADD,Dana Desa, Bagi Hasil Pajak terkafer semua di APBDES berapa jumlah pendapatanta 1 tahun. nanti pelaporannya ada di bilang realisasi ADD, ada juga Dana Desa tersendiri” (Hasil Wawancara 26 Januari 2017)

Disisi lain penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu Perangkat Desa di Desa Abbatireng. Salah satu informan juga menerangkan bahwa memang benar Laporan ADD tahap II belum dilaporkan. Hal tersebut di jelaskan oleh Sustina :

“Laporan ADD belum selesai karena Pegawai senior sibuk dengan urusan pribadi masing-masing dan kita sudah dapat surat teguran dari BPMDK karena belum setor ke kantor” (Hasil Wawancara, 13 Februari 2017)

Hal tersebut juga di benarkan oleh Kepala Desa Abbatireng, H.Andi Sampewali yang menyatakan bahwa : “Laporan Realisasi tahap dua atau tahap akhir belum diselesaikan oleh Sekertaris Desa, yang selesai baru tahap pertama” (Hasil Wawancara, 25 Januari 2017) untuk melihat ketepatan waktu Pengelola ADD pada saat pelaporan maka

penulis juga melakukan Wawancara pada pihak BPMDK. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman bahwa:

“Untuk laporan realisasi tahap dua ADD tahun 2016 Desa Abbatireng sampai sekarang belum ada masuk, baru tahap pertama. untuk realisasi tahap kedua, kemarin kami sudah surati tapi belum ada yang masukkan seharusnya masuk paling lambat minggu kedua bulan Februari. Sebenarnya ini sudah sangat terlanjut“(Hasil Wawancara 20 Februari 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Abbatireng ke BPMDK Kabupaten Wajo masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan Terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II .

4.4.5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Abbatireng tergolong Sekertaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPD. pihak ketiga yang dimaksud di Desa Abbatireng adalah Sekretaris Desa yang lama dan sekarang menjabat sebagai Ketua LPMD. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Oleh Sekretaris Abbatireng, Aslidayanti menyatakan bahwa:

“Dalam Pembuatan Laporan PertanggungJawaban biasanya kami lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, jadi karena belum mampu membuat biasanya kami menyewa Jasa, karena kami sempat mengajukan pelatihan kepada BPMDK tapi di tolak. Karena Sebelumnya saya kerja di kantor pertanian jadi belum ada pengalaman,apalagi petunjuk teknis pengelolaan ADD berubah setiap tahunnya.untuk tahun 2017 akan berubah lagi. Dalam LPPD biasanya meminta bantuan kepada Sekdes yang lama karena sekdes yang lama lebih mengetahaui hal tersebut”. (Hasil Wawancara 20 Januari 2017).

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman mengatakan bahwa :

“Kami telah membagikan pedoman petunjuk teknis ADD ke setiap desa yang ada di Kabupaten Wajo Didalamnya sudah terdapat format Pelaporan dan format lainnya.” (Hasil Wawancara tanggal 20 Februari 2017).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa pada bab VII tentang

Pertanggungjawaban pada pasal 12 bahwa dalam melakukan Pertanggungjawaban berisi tentang :

- a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa,
- b. Tunjangan BPD,
- c. Tunjangan Imam Desa , imam Dusun dan Guru Mengaji,
- d. Tunjangan Bendahara Desa.
- e. Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan
- f. Belanja sumber Daya Manusia
- g. Biaya Perjalanan Dinas

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh Tim Pendamping tersebut belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa Abbatireng, H.A.Sampewali mengatakan bahwa : “Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditugaskan untuk melakukan Pembinaan belum bekerja secara maksimal” (Hasil Wawancara 1 Februari 2017).

Selain itu, realitas yang terjadi di Desa Abbatireng bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong lambat. Hal ini dikarenakan Sekretaris baru kurang paham terhadap tugas tersebut. Akibatnya, pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan waktu dari mantan Sekretaris Desa sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Abbatireng, Aslidayanti

mengatakan bahwa: “Sementara ini kami baru menyusun LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) sebenarnya sudah agak terlambat ” (Hasil Wawancara 1 Februari 2017)

Sejalan dengan hal tersebut, Bendahara Desa Abbatireng juga mengatakan hal yang sama, yakni : “Untuk Pertanggung Jawabanya kita baru mau di periksa, dan laporan pertanggungjawaban sementara baru di kerjakan” (Hasil Wawancara 13 Februari 2017) Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman mengatakan bahwa :

Seharusnya Pemerintah Desa sudah membuat LPPD paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan artinya bulan 1 Pemerintah Desa sudah merampungkan semuanya. (Hasil Wawancara, 20 Februari 2017)

Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut, Hal tersebut di terangkan oleh Bendahara Desa Abbatireng, Junaeda bahwa :

“Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat Pertanggung Jawaban nantinya”. (Hasil Wawancara 1 Februari 2017).

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun,

realitas yang terjadi di Desa Abbatireng bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

4.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber Keuangan Desa yang diterima dari bagi hasil Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) minimal 10% akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sebagai berikut :

4.5.1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya Proses pengelolaan ADD di Desa Abbatireng adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partispasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Desa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Desa Abbatireng, H.A.Sampewali mengatakan bahwa :

“Faktor penunjang terlaksananya realisasi penggunaan ADD masyarakat cukup merespon, dan dalam pembuatan jalan tani masyarakat mengibahkan sebagian tanahnya” (Hasil Wawancara, 25 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pemerintah Desa. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADD yang akan dilaksanakan di Desa Abbatireng. Salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan jalan tani dimana masyarakat menghibahkan tanahnya untuk akses jalanan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah : 1) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan;

dan 2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Aparat Pemerintah Desa Abbatireng terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat memudahkan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat Pemerintah Desa Abbatireng memiliki kendaraan, Contohnya dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan *survey* sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan seperti halnya Printer *brother* yang dapat meng *fotocopy* atau menggandakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Abbatireng bahwa:

“Pemberian motor dinas sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas, apalagi sekarang ada printer yang bisa mengfotocopy jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mengfotocopy”. (Hasil Wawancara 13 Februari 2017).

Berdasarkan realita tersebut, terlihat upaya Aparat Pemerintah Desa Abbatireng dalam mendukung sarana dan Prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan.

4.5.2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah Desa, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada Pelaksana Tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan ADD, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng kurang baik. Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal. Terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Desa di Desa Abbatireng rata-rata berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD, jenjang pendidikan aparat Pemerintah Desa di Desa Abbatireng dapat dilihat dalam tabel 15.

Tabel 15. Pendidikan Terakhir Aparat Pemerintah Desa Abbatireng

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	H.A. Sampewali	Kepala Desa	SLTA
2.	Aslidayanti SP	Sekretaris Desa	S1
3.	Junaeda A.Ma	Kaur Pembangunan	D1
4.	Ramayana S.Sos	Kaur Pemerintahan	S1
5.	Bengga	Kaur Umum	SMK
6.	H.Muh Edi	Kepala Dusun Lebong	SMA
7.	Karaka	Kepala Dusun Labempa	SMA
8.	Mappangile	Kepala Dusun Anukaraja	SMA
9.	Hastuti	-	SMK
10.	Sustina	-	SMK

Sumber : Sekertaris Desa Abbatireng,2017

Tabel 15 menunjukan bahwa minimnya Pendidikan aparatur pemerintah di Desa Abbatireng rata-rata berpendidikan SMA/SMK. dapat dilihat dari kepala Desa Abbatireng yang hanya berpendidikan SLTA dan Perangkat Desa lainnya rata-rata berpendidikan SMA/SMK, rendahnya tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan Pengelolaan ADD, Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan tidak maksimalnya dalam Pengelolaan ADD. Kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia ditingkat Aparat pemerintahan desa sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang di atasnya belum maksimal.

Konteks untuk melaksanakan sejumlah keputusan Aparat Pemerintah Desa Abbatireng dapat melaksanakanya, dengan adanya

keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Abbatireng menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak, Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ADD disebabkan oleh Sekertaris Desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh Sekertaris Desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Hal tersebut di peroleh dari hasil Wawancara dengan Kepala Desa Abbatireng, H.A. Sampewali mengatakan bahwa :

“ Yang menjadi kendala kita saat ini dalam pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan ADD Sekertaris Desa yang PNS di alihkan ke Kecamatan dari 100% D ganti oleh nol 0%, Sekertaris Desa yang baru dilantik sekitaran 6 bulan yang lalu dan sementara baru belajar” (Hasil wawancara 25 Januari 2017)

Aparat Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan Desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Latar belakang Pendidikan Sekretaris Desa Abbatireng yang baru yakni Strata satu (S1), namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan ADD terlaksana dengan baik di karenakan Sekertaris Desa Abbatireng baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.

- b. Peraturan tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Peraturan tentang pengelolaannya diatur berbeda setiap tahunnya. Fenomena tersebut menjadi kendala bagi Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh Kepala Desa Abbatireng, H.A.Sampewali bahwa :

“Untuk juknis ADD, setiap tahun berubah tahun 2016 kita gunakan peraturan bupati nomor 2 tahun 2016, dan untuk 2017 ada lagi yang di keluarkan sama Bupati dan yang bagikan nanti dari BPMDK, karena itu kita biasa bingung dimana letak perbedaanya, apa lagi kan kita sekdes baru” (Hasil Wawancara 25 Januar 2017)

Merujuk pada hasil Wawancara tersebut, maka penulis membandingkan perbedaan Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa yang membuat Aparat Pemerintah Desa Abbatireng dilema dalam melaksanakan proses pengelolaan ADD. perbedaan peraturan Bupati nomor 2 tahun 2016 dengan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2017 terletak pada Bab V bagian kedua mekanisme pencairan pasal 10 bahwa rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran, untuk Laporan Berkala (Tahap I) disertai dengan lampiran :

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
3. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya
4. LKPJ Akhir tahun pada tahun sebelumnya
5. Peraturan Desa Tentang APBDes tahun berjalan
6. Rencana Penggunaan Dana
7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Tahun Anggaran Sebelumnya.
8. SPTB bermaterai Rp.6.000,- tahap sebelumnya
9. Kwitansi bermaterai RP.6.000,-
10. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa
11. Bebas temuan dari inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.

Surat Permohonan Pencairan ADD Laporan Akhir (Tahap II) disertai dengan lampiran:

1. Rencana Penggunaan Dana
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
3. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-
4. Pertanggung Jawaban Tahap I (Pertama)

Sedangkan mekanisme pencairan dalam Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2017 pasal 10 bahwa permohonan penyaluran/pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat

ditujukan kepada Bupati Cq, Kepala BPKAD Kabupaten Wajo, surat permohonan pencairan ADD di lampiri :

- c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I/II
- d. Surat pernyataan tanggungjawab belanja (tahap sebelumnya)
- e. Pertanggungjawaban Penggunaan ADD (setiap tahap)
- f. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-
- g. Foto Copy rekening Pemerintah Desa
- h. Bebas temuan tahun sebelumnya dari inspektorat Daerah Kabupaten Wajo (untuk pencairan Tahap Pertama)
- i. Rekomendasi Pencairan

Rekomendasi yang di maksud huruf (g) di keluarkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo setelah diadakan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa).
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- c. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa (tahun sebelumnya)
- d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (tahun sebelumnya)
- e. Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (tahap sebelumnya)

- f. Bebas temuan tahun sebelumnya dari inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.(untuk pencairan Tahap I)
- g. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I/II
- h. Laporan konsolidasi tahap I/II

Letak perbedaan selanjutnya yaitu pada Bab VI penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 11 ayat 6 bahwa biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa, bagi desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dapat diperuntukan untuk membiayai beban atas:

- a. Belanja surat menyurat (ATK, cetak, Materai dan Penggandaan)
- b. Belanja jasa sewa (Sewa Tenda, Kursi/Meja, Sound sistem dll)
- c. Belanja makan dan minum rapat dan hari H
- d. Mobilisasi Massa
- e. Transport panitia

Sedangkan dalam Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis ADD tidak terdapat peraturan mengenai penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa, bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mekanisme pencairan Dana tersebut dilampiri dokumen yang berbeda .

c. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa Abbatireng komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan ADD, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Abbatireng mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

Dalam forum MusrenbangDesa Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri MusrenbangDesa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat di depan umum, Hal tersebut di terangkan oleh Kepala Dusun Abbatireng, H.Muh.Edi mengatakan bahwa :

“Masyarakat sangat antusias pada saat akan di Adakan MusrenbangDesa tapi pada saat MusrenbangDesa berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga Pemerintah Desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan, biasanya nanti setelah MusrenbangDesa banyak masyarakat yang agak Protes dan bernada kontra terhadap hasil yang telah di tentukan “
(Hasil Wawancara 26 Januari 2017)

Sejalan dengan pendapat diatas, salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Lebong juga mengatakan hal yang serupa, bahwa :

“Memang kebanyakan masyarakat di Dusun Lebong pada saat Musrenbang Desa tidak terlalu aktif dalam forum, tetapi kalau diluar forum masyarakat tersebut aktif membicarakan program yang akan dilaksanakan. Kita tidak terbiasa bicara di depan umum jadi kebanyakan masyarakat malu mengungkapkan pendapatnya”
(Hasil wawancara, 2 Februari 2017)

Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat untuk mampu menciptakan suasana rapat yang mempunyai *feedback*, sebab jika peserta rapat kebanyakan diam, maka forum Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Desa Abbatireng hanya berlangsung satu arah sehingga aparat pemerintah Desa Abbatireng mempunyai kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi

hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Abbatireng yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum .

5.2 Saran

1. Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Abbatireng harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.

2. Aparat Desa Abbatireng, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Abbatireng dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arifin Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
- Bambang Trisantono Soemantri.(2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Badruddin,Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta Cv, Bandung.
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho. (2003). Good Governance. Bandung : Mandar Maju
- Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Poerwadarminta,W.J.S.(1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo.(1999).Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahdan, Goris dkk. (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Yogyakarta: FPPD
- Saleh, Hasrat Arief. *et. al.* (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi*. FISIP Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Syafi'l Kencana Inu. (1994). Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah Desa.

- Singarimbun, Masri dan Effendi. (1995). Metode Penelitian Survey. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Sutoro Eko. (2015).Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro Eko. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Tim Penyusun,.(2013), *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi*. Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Wiratna Sujarweni V, Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press.
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:
- Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada
- Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang- undang :

- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tetang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Internet :

<https://www.google.com/search?q=modul+pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (di akses pada tanggal 28 Februari 2017, Pukul 14.00 WITA)

<https://www.google.com/search?q=ejurnal+penatausahaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (di akses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 20.00 WITA)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi> (di akses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 22.00 WITA)

<https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fnandadianats%2Fpentingnya-sumber-daya> (di akses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 19.00 WITA)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : **40/S.01P/P2T/01/2017**
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Wajo

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 8604/UN4.8.1/PL.02/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI SITI SRI HUTAMI**
Nomor Pokok : E12113305
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Januari s/d 10 Maret 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 Januari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP BKPM 05-01-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmduiselsulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 2

Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 OKTOBER 2015

BUPATI WAJO,


ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAJO



FERDAUS PERKESI

DILAH DITETAPKAN
DITETAPKAN DAN DITUNDUKAN
DITETAPKAN DAN DITUNDUKAN
DITETAPKAN DAN DITUNDUKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 3

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemeriksaan, keuangan dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa.
- (2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

BAB X SANKSI

Pasal 57

Sanksi diberikan kepada Desa apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa berupa:

- a. penundaan pencairan dana berikutnya;
- b. pengurangan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim Pengendali Kabupaten dan Tim fasilitasi Kecamatan, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 58

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban APBDesa**

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
 - c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Format rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 53

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam pasal 52 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. papan pengumuman desa;
 - b. radio komunitas; dan
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.
 - (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 1.

Pasal 49

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.

Bagian Kedua Penatausahaan APBDesa

Pasal 50

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum Desa;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. Buku Pembantu Bank;
 - d. Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. Surat Tanda Bukti Penerimaan;
 - f. bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- (4) Setiap penerimaan desa secara tunai wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaporan APBDesa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat meliputi:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.

mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

- (4) Format lampiran RAB dan buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) TPK/pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 45

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
- c. bukti transaksi;

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Koordinator PTPKD berkewajiban melakukan verifikasi untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (3) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a serta format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 39

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan, dilaksanakan 6 (enam) bulan.

BAB VIII PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa

Bagian Kesatu Pelaksanaan APBdesa

Pasal 40

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank milik Pemerintah.
- (3) Penunjukan Bank milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran desa untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan

Pasal 35

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) dilakukan Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 36

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa yang tidak disepakati BPD sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII PERUBAHAN APBDESA

Pasal 38

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - f. keadaan luar biasa.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.
- (5) Tata cara pengajuan dan penetapan Perubahan APBDesa, sama dengan tata cara pengajuan dan penetapan APBDesa.
- (6) Format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengundang pejabat Pemerintah Desa yang terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (6) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (8) Dalam hal Camat menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya berdasarkan saran dan pertimbangan Camat.
- (10) Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan dalam Berita Desa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBDesa;
 - b. rincian APBDesa menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
 - c. daftar Dana Cadangan Desa (apabila ada); dan
 - d. daftar penyertaan modal Desa (apabila ada).

1.

- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDDesa.

Pasal 31

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Camat langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (8) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VI PENETAPAN APBDESA

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disertai dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan.
 - b. Keputusan BPD tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - d. daftar hadir rapat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBDDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber Dana Cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan pada BUMDes.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Pasal 30

- (1) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 7.

Pasal 26

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.



Pasal 23

- (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 24

- (1) Jenis belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 25

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
 - e. cetak/penggunaan;
 - f. sewa gedung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Pemberian barang pada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- (8) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 21

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragraf Kedua Belanja Desa

Pasal 22

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesanya digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit **70%** (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai
 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. bidang belanja tidak terduga.
 - b. paling banyak **30%** (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

1.

- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Paragraf Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 19

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- (2) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil aset Desa;
 - c. swadaya dan partisipasi;
 - d. gotong royong; dan
 - e. lain-lain PADesa.
- (3) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasil laba BUMDesa.
- (4) Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. hasil tanah desa;
 - b. hasil pasar desa;
 - c. hasil pasar hewan desa;
 - d. hasil bangunan desa;
 - e. hasil hutan milik desa;
 - f. mata air milik desa;
 - g. pemandian umum desa;
 - h. obyek rekreasi desa;
 - i. lapangan desa; dan
 - j. hasil dari aset lain milik desa.
- (5) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
- (6) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain – lain PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain :
- a. pungutan desa;
 - b. hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
 - c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
 - d. bunga simpanan uang di bank.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan desa; dan
 - b. penerimaan pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Desa terdiri dari:
 - a. belanja desa; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Bagian Kedua Struktur APBDesa

Pasal 15

Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

Pasal 16

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

Pasal 17

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa

BAB IV AZAS UMUM DAN STRUKTUR

Bagian Pertama Azas Umum APBDesa

Pasal 10

- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa;
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. otorisasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. alokasi;
 - e. distribusi; dan
 - f. stabilisasi.
- (4) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RPJMDesa;
- (5) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (6) Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa;
- (7) Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan;
- (8) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d berarti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e berarti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f berarti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
 - b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran belanja kegiatan;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Desa; dan
 - f) menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan bersama unsur pelaksana kegiatan lainnya meliputi lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat melalui musyawarah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a) Kepala Desa selaku penanggungjawab
 - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD
 - c) Bendahara Desa
 - d) Kepala Seksi yang membidangi, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
 - e) Anggota sebanyak 3 orang dari unsur masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan lainnya, pelaksana kegiatannya menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi bantuan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dijabat oleh Kaur Keuangan atau staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan personil pada Urusan Keuangan, maka Bendahara Desa dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang dianggap cakap dan mampu.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

7.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Asas pengelolaan keuangan desa adalah:
- a. tertib;
 - b. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. partisipatif;
 - g. transparan;
 - h. bertanggung jawab;
 - i. adil;
 - j. patut; dan
 - k. bermanfaat untuk masyarakat.
- (2) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Yang dimaksud dengan taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Yang dimaksud dengan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (8) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (9) Yang dimaksud dengan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (11) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (12) Yang dimaksud dengan bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 1.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDAerah) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
24. Peraturan Desa adalah Peraturan PerUndang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui ketidak sesuaian/ketidak selarasan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan PerUndang-undangan yang lebih tinggi;
26. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah hasil musyawarah desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
29. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
31. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode Anggaran;
36. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
37. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wajo;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wajo;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

1.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 47 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

7.



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO

NOMOR : 51 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 11 Januari 2106

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 11 Januari 2106

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

FIRDAUS PERKESI

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016
NOMOR 2**

- (3) Penyelesaian atas penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi dana Desa (ADD), penyelesaiannya dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi desa yang dianggap berprestasi dalam mengelola ADD.
- (2) Bupati dapat mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bagi desa yang mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran, akan dikurangi jumlah Alokasi Dana Desanya pada tahun berikutnya.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (4) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Format Surat Permohonan Pencairan ADD, RAB, RPD, SPTB, Kwitansi, Daftar Penerimaan, Surat Tugas, SPPD, Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1), dan ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penggunaan ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - a. Pejabat fungsional/struktural yang ada di tingkat kabupaten.
 - b. Tim pendamping tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten
 - c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - d. Masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pengawasan eksternal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun.
- (3) Bentuk dan Susunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APBDesa adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap Semester dan atau 6 Bulan (Sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban), yang berisi realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dibuat sesuai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Imam Desa, Imam Dusun dan Guru Mengaji
- Daftar Tanda Terima
- Kuitansi
- d. Tunjangan Bendahara Desa
 - SK Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Bendahara Desa
 - SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa
 - Daftar Tanda Terima
 - Kuitansi
- ✓ (4) Belanja Oprasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan dilengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa, dan khusus belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan dokumen :
 - a. Dasar Pelaksanaan
 - b. Surat tugas;
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - d. Kuitansi pembayaran.
 - e. Laporan Perjalanan Dinas
- (5) Belanja peningkatan Sumber Daya Manusia dilengkapi dengan dokumen :
 - a. Dasar Pelaksanaan
 - b. Surat Tugas
 - c. Sertifikat
 - d. Kuintasi
- (6) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud ayat (3), bagi Kepala Desa dan Ketua BPD dipersamakan dengan PNS Golongan III sedangkan bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD dipersamakan dengan PNS Golongan II.
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud ayat (5) berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Kabupaten Wajo, Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Provinsi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa
- (2) Pertanggungjawaban terhadap tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Imam Desa, Imam Dusun, Guru Mengaji dan Bendahara Desa atau sejenisnya dilampiri dengan dokumen.
- (3) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilengkapi dengan dokumen :
 - SK Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih
 - SK Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
 - Daftar Tanda Terima
 - Kuitansi
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilengkapi dengan dokumen :
 - SK Bupati tentang pengesahan penetapan anggota BPD
 - SK Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Anggota BPD
 - Daftar Tanda Terima
 - Kuitansi;
 - c. Tunjangan Imam Desa, Imam Dusun dan Guru Mengaji dilengkapi dengan dokumen:
 - SK Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Imam Desa, Imam Dusun dan Guru Mengaji

- m. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan desa
- (11) Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksana kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain (gambar) yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat :

Penanggung Jawab	: Kepala Desa
Jenis Pekerjaan	:
Volume	:
Lokasi	:
Jumlah Dana	:
Sumber Dana	: ADD T.A.
Tenaga Teknis / Konsultan	:
Pelaksana	: Ketua LPMD
 - Biaya untuk penyusunan RAB dan desain sebagaimana dimaksud poin b oleh konsultan atau tenaga teknis mengacu pada peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa
 - Setiap pembangunan fisik mengalokasikan, pembuatan prasasti pada RAB masing – masing kegiatan
 - Prasasti sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dibuat secara permanen dengan ukuran $\pm 50 \text{ Cm}^2$ yang menggambarkan jenis kegiatan dan sumber anggaran serta tahun pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (12) Pengaturan berkenaan dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta nama program dan kegiatan menurut urusan pemerintah desa diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c dan d ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Besarnya Biaya Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e Maksimal 10 % dari Jumlah ADD
- (6) Besarnya Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f maksimal 5 % dari Jumlah ADD
- (7) Besarnya Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g maksimal 2 % dari Jumlah ADD
- (8) Besarnya dana untuk pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing desa dengan pagu anggaran maksimal 5 % Jumlah ADD
- (9) Biaya untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i digunakan sebagian atau seluruhnya untuk pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (10) Belanja pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
 - c. Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan.
 - d. Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan
 - e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - f. Pengembangan tata desa dan teknologi tepat guna.
 - g. Perbaikan pendidikan dalam skala kecil.
 - h. Pengembangan Sistem informasi Pembangunan Desa
 - i. Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik
 - j. Biaya Jaminan Kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa
 - k. Pengembangan sosial budaya.
 - l. Kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan sistem kelompok.

BAB VI
PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
 - b. Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk biaya :
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Tunjangan Imam Desa, Imam Dusun dan Guru Mengaji
 - d. Tunjangan Bendahara Desa
 - e. Operasional Pemerintah Desa meliputi :
 - Belanja ATK, Materai Cetak dan Penggandaan
 - Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik
 - Belanja Jasa Informasi (Koran / Majalah)
 - Belanja Makan Minum Harian dan Rapat
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
 - Belanja Jasa Kebersihan Kantor
 - Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
 - f. Operasional BPD meliputi :
 - Belanja ATK, Materai Cetak dan Penggandaan
 - Belanja Makan Minum Harian dan Rapat
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
 - g. Operasional Lembaga Kemasyarakatan meliputi :
 - Belanja ATK, Materai Cetak dan Penggandaan
 - Belanja Makan Minum Harian dan Rapat
 - h. Peralatan/Perlengkapan Kantor
 - i. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa

- c. LPPD akhir Tahun pada Tahun sebelumnya; ✓
 - d. LKPJ akhir Tahun pada Tahun sebelumnya; ✓
 - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
 - f. Rencana penggunaan dana;
 - g. Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bermaterai Rp. 6.000,- tahap sebelumnya;
 - i. Kuitansi bermaterai Rp. 6.000,-;
 - j. Foto copy rekening pemerintah desa. ✓
 - k. Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah Kab. Wajo ✓
- (3) Surat permohonan pencairan ADD tahap II dilampiri:
 - a. Rencana penggunaan dana;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tahap sebelumnya;
 - c. Kuitansi bermaterai Rp. 6000,-;
 - d. Pertanggungjawaban tahap I
 - (4) Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan dikembalikan ke desa untuk disempurnakan.
 - (5) Surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya yang dinyatakan lengkap dan/atau sudah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibuatkan surat rekomendasi persetujuan pencairan ADD oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan diteruskan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung ke Rekening Pemerintah Desa.
 - (7) Pencairan dana dilakukan oleh bendahara desa pada Bank yang ditunjuk pemerintah.
 - (8) Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dibukukan dalam Buku Kas Umum

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari keseluruhan jumlah ADD
 - b. Tahap II sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari keseluruhan jumlah ADD
- (2) Pengajuan pencairan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah tertampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Pengajuan Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan mekanisme dan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan

Pasal 10

- (1) Permohonan Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD Kab. Wajo setelah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi pencairan dari Kepala BPMPDK Kab. Wajo.
- (2) Surat permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)

BAB VI PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa disusun oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dan disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa.
- (2). Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- (3). Musyawarah Rencana Pembangunan Desa menghasilkan:
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan.
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan dana Block Grand.
- (5). Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagaimana dimaksud ayat (4), dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
- (6). RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7). RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), dituangkan ke dalam APBDesa yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Pasal 8

Tim Pelaksana Tingkat Desa menyusun rencana penggunaan dana yang selanjutnya disebut (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.

- (5) Kepala desa mengangkat bendahara desa dari perangkat desa dan bukan dari keluarga Kepala Desa (Orang tua, suami/istri dan anak).
- (6) Bendahara desa ditetapkan dengan keputusan Kepala desa
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran endapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Pasal 6

- (1) Tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah :
 - a. Bersama-sama pemerintah Desa menyusun daftar rencana kegiatan;
 - b. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan berseta Rencana Anggaran Biaya dan Desain;
 - c. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPDK.
 - d. Melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari ADD;
 - e. Melakukan penyusunan, penggunaan dan pengelolaan ADD;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Cq. Kepala BPMPDK.
 - g. Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pembangunan secara partisipatif
 - h. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- (2) Kewajiban tim pelaksana kegiatan adalah:
 - a. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana.
 - b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.

Bagian Ketiga
PELAKSANA TINGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan/sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat;
 - b. Mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memantau pelaksanaan dan membuat laporan berkala maupun laporan akhir kegiatan kepada Camat.
 - e. Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Camat. setiap akhir bulan berjalan dan laporan akhir disampaikan setiap akhir tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan kegiatan berdasarkan program setiap kelompok pada bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Kegiatan Tak Terduga
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua TPK : Unsur Perangkat Desa
 - b. Sekretaris TPK : Ketua LPMD
 - c. Anggota : Terdiri dari 3 (tiga) Orang dari unsur Perangkat Desa, LPMD dan Masyarakat Lainnya

- c. Anggota : Unsur Perangkat Kecamatan dan unsur lain yang dianggap Berkompeten
- (3) Unsur lain yang dimaksud pada ayat (2), huruf c adalah orang yang mempunyai kemampuan tentang pengelolaan ADD seperti mempunyai pengetahuan tentang penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Jumlah Tim Pendamping Tingkat Kecamatan minimal 3 maksimal 5 orang pada masing-masing kecamatan.
- (5) Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah :
- Memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa
 - Memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada Pelaksana Tingkat Desa
 - Melakukan inventarisasi aset Desa
 - Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan
 - Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
 - Memberikan laporan kemajuan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
- (6) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf g, dikirim ke Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap semester tahun berjalan.
- (7) Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbentuknya tim fasilitasi tingkat Kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten pada DPA SKPD Kecamatan.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri unsur pemerintah dan unsur lain yang terkait dengan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan desiminasi akan kebijakan data dan informasi tentang ADD
 - b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa
 - c. Membantu Tim Kecamatan untuk membimbing pembuatan rencana penggunaan ADD kepada Pemerintah Desa.
 - d. Menetapkan besaran ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan
 - e. Melakukan verifikasi berkas atas pengajuan pencairan add setelah diverifikasi di tingkat kecamatan
 - f. Memberikan laporan kemajuan penggunaan dana ADD kepada Bupati.
 - g. Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud huruf e, dibuat dalam bentuk rekap kabupaten setelah mendapat laporan kemajuan dari masing-masing kecamatan.
 - h. Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud huruf f, dibuat pada setiap semeseter tahun berjalan berdasarkan laporan dari kecamatan.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbentuknya tim fasilitasi tingkat Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.

Bagian Kedua
TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dibentuk di Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
17. Sekretariat Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten adalah yang berkedudukan pada BPMPDK Kabupaten Wajo

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan pada APBD Kabupaten setiap tahun anggaran melalui Badan Penguasa Keuangan Daerah Kabupaten Wajo
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis

BAB III INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepetingan masyarakat setempat dalam sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara deokratis
11. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.
12. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
13. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah tim kerja yang dibentuk di kecamatan yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
15. Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah tim kerja yang dibentuk di desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo
3. Bupati adalah Bupati Wajo
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



Da. ABBATIKENL

**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2016**

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

LAMPIRAN 3

**Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa**

LAMPIRAN 4

Format RKP Desa Abbatireng

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2016

A : Abbatireng
AMATAN : Gilitreng
UPATEN : Wajo
WINSI : Sulawesi selatan

Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
						Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	c.	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	a. Belanja Pegawai	Abbatireng	1 Paket	Perangkat Desa	2016		APBDDesa				
	b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Abbatireng	1 Paket	Perangkat Desa	2016	70,200,000	APBDDesa				
	c. Tunjangan BPD	Abbatireng	1 Paket	BPD	2016	11,672,643	APBDDesa				
	d. Tunjangan Imam Desa, Imam Dusun dan Guru Mengaji	Abbatireng	1 Paket	Pegawai Syara	2016	16,200,000	APBDDesa				
	e. Tunjangan Bendahara	Abbatireng	1 Paket	Bendahara	2016	3,000,000	APBDDesa				
	f. Operasional Pemerintahan Desa	Abbatireng	1 Paket	Perangkat Desa	2016	34,371,547	APBDDesa				
	g. Operasional BPD	Abbatireng	1 Paket	Masyarakat	2016	4,232,643	APBDDesa	V			
	h. Operasional LPMD	Abbatireng	1 Paket	Masyarakat	2016	2,117,321	APBDDesa	V			
	i. Penyelenggaraan musyawarah Desa	Abbatireng	15 Kali/Thn	Masyarakat	2016	5,000,000	APBDDesa	V			
	j. Pengelolaan Informasi Desa	Abbatireng	1 Paket	Masyarakat	2016	600,000	APBDDesa	V			
	k. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Abbatireng	1 Paket	Masyarakat	2016	6,500,000	APBDDesa	V			
	l. Penyusunan RKPD dan RPJMDDes	Abbatireng	2 Paket	Masyarakat	2016	1,000,000	APBDDesa	V			
	m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Abbatireng	1 Paket	Masyarakat	2016	16,023,083	APBDDesa	V			
						170,917,237					
Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Perintisan Jalan Tani	Abbatireng	1835 X 3 M	Masyarakat	2016	81,666,100	APBDDesa	V			
	b. Pembangunan PAUD	Anukaraja	1 Unit	Masyarakat	2016	149,725,500	APBDDesa	V			
	c. Pembangunan Embung-embung	Abbatireng	10 Unit	Masyarakat	2016	236,776,800	APBDDesa	V			
	d. Pembangunan Poskamlah	Anukaraja	2 Unit	Masyarakat	2016	21,588,000	APBDDesa	V			
	e. Rehab Talud Cekdam	Labempa	1 Unit	Masyarakat	2016	4,500,000	APBDDesa	V			
	f. Pembangunan Cekdam	Anukaraja	1 Unit	Masyarakat	2016	27,894,600	APBDDesa	V			
	g. Pembangunan Pagar Kantor Desa	Labempa	32 M	Masyarakat	2016	37,112,600	APBDDesa	V			
	h. Rehab Parkir Motor	Labempa	3x4 M	Masyarakat	2016	5,125,951	APBDDesa	V			
						564,389,551					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Per Bidang 2									
		a. Pengembangan SDM	3 Org	Masyarakat	2016	15,000,000	APBDDesa	V			
		Jumlah Per Bidang 3				15,000,000					



VIWA R. 2. 208

Jlm Penunangan RKB Desa
Dianerun oleh:
Apprentice 13 Januari 2016

Jumlah TOTAL									
Jumlah Per Bidang 4									
i	Pemeliharaan Kantor, Pagar, Desa	Apprentice	1 Paket	Masyarakat	3010	44'253'013	VBIDDes	A	
ii	Pelatihan Ketersediaan Menjajit	Apprentice	1 Paket	Masyarakat	3010	2'000'000	VBIDDes	A	
iii	Soal-soal Ketersediaan	Apprentice	1 Paket	Masyarakat	3010	0'431'130	VBIDDes	A	
iv	Pemeliharaan BPT	Apprentice	10 Unit	Masyarakat	3010	13'300'000	VBIDDes	A	
v	Pemeliharaan BPT Suku	Apprentice	1000 Pkn	Masyarakat	3010	10'432'331	VBIDDes	A	
vi	Pemeliharaan BUMDES	Apprentice	1 Paket	Desa	3010	1'000'000	VBIDDes	A	
vii	Desa	Apprentice	1 Paket	Desa	3010	1'000'000	VBIDDes	A	
viii	dan Pemeliharaan Ketersediaan	Apprentice	1 Paket	Pemeliharaan	3010	1'000'000	VBIDDes	A	
ix	Pelatihan Pemeliharaan VAB Desa	Apprentice	1 Paket	Desa	3010	1'000'000	VBIDDes	A	
x	Pelatihan Pemeliharaan Pemas	Apprentice	1 Paket	Pemeliharaan	3010	25'800'000	VBIDDes	A	

LAMPIRAN 5.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Desa Abbatireng, H.A.Sampewali



Wawancara dengan Sekretaris Desa Abbatireng, Aslidayanti SP



Wawancara dengan Bendahara Desa Abbatireng, Junaeda A, Ma



Wawancara dengan Kepala Dusun Labempa Desa Abbatireng, Karaka



Wawancara dengan Kepala Dusun Lebong Desa Abbatireng, H. Muh Edi



Wawancara dengan Mantan Sekertaris Desa Abbatireng, Anwar S.Sos



Wawancara dengan Ketua BPD Desa Abbatireng, Drs Asdar M.Pd



Wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD
Kab.Wajo Syarifah Chaerul Yaman S.Sos



Wawancara dengan Perangkat Desa Abbatireng, Sustina dan Hastuti

LAMPIRAN 6.

**Dokumentasi Realisai Penggunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Abbatireng**

1. Foto Pembangunan Pagar Kantor Desa Abbatireng 50-100%



2. Pembangunan Parkiran Motor Kantor Desa Abbatiireng 50-100%



3. Pembangunan Cekdam-embung Dusun Anukaraja 50-100%



4. Pembangunan Pos Kamling Dusun Anukaraja 50-100 %



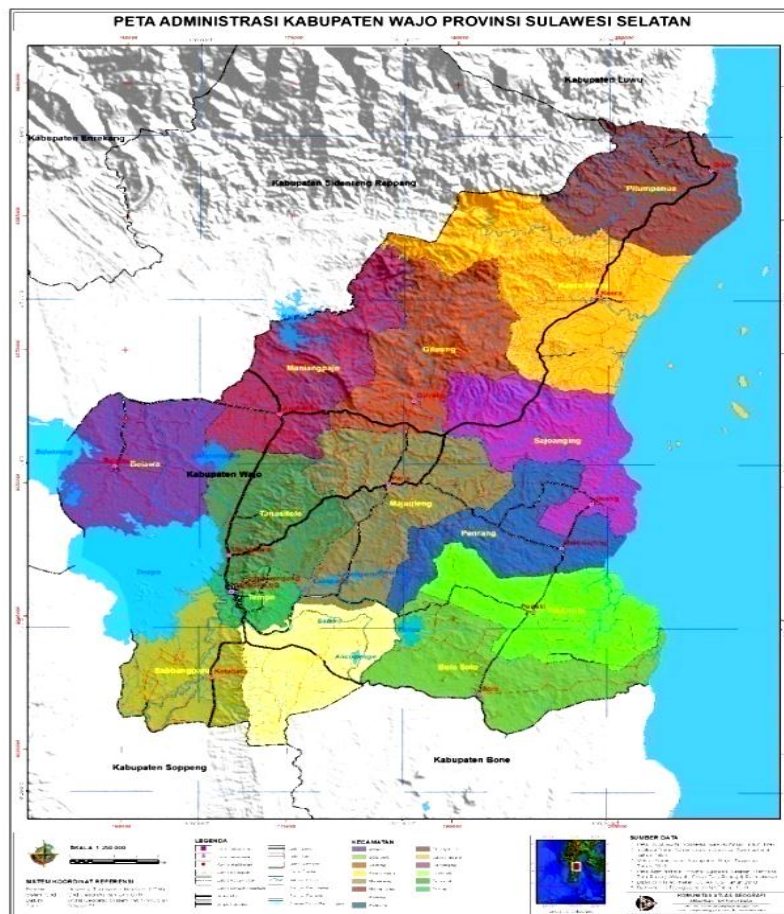
LAMPIRAN 7 .

**Peta Admistrasi Desa Abbatireng
Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,**

a. Peta Administrasi Kabupaten Wajo

Berikut pembagian wilayah Kabupaten Wajo yang direpresentasikan dalam gambar 2.

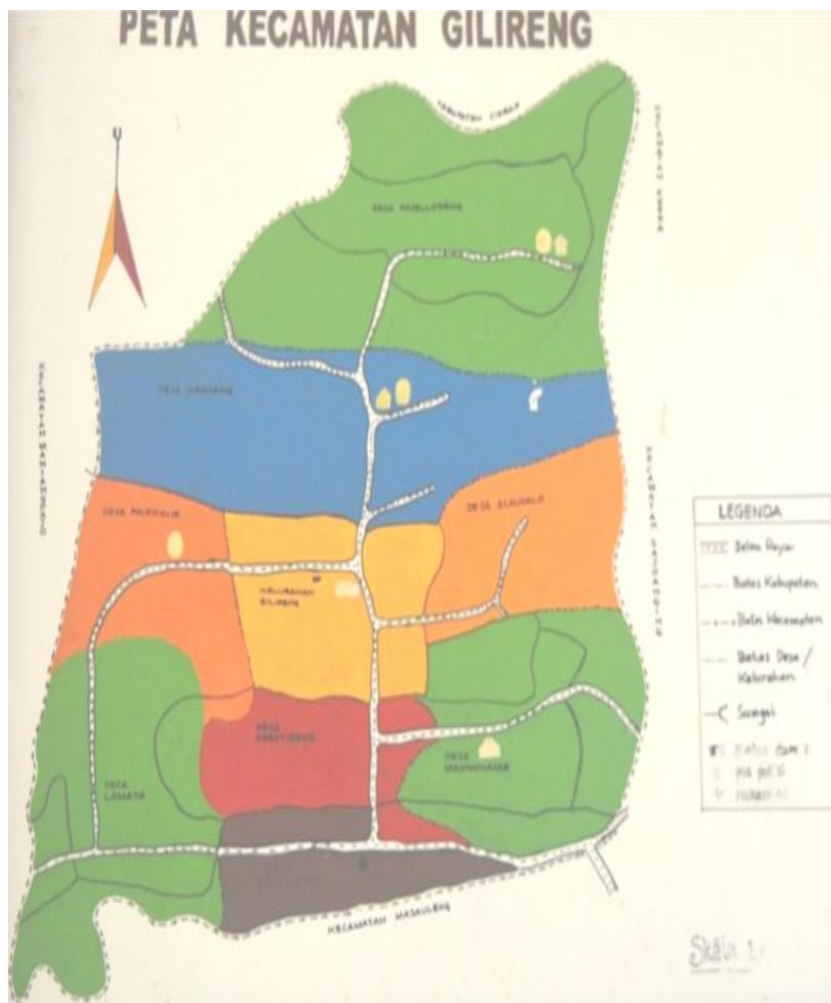
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Wajo



b. Peta wilayah Kecamatan Gilireng

Berikut pembagian wilayah administrasi Kecamatan Gilireng yang direpresentasikan dalam gambar 3.

Gambar 3. Peta wilayah Kecamatan Gilireng



c. Peta Wilayah Desa Abbatiireng

Berikut pembagian wilayah Kabupaten Wajo yang direpresentasikan dalam gambar 4.

Gambar 4. Peta Desa Abbatireng



LAMPIRAN 8.

Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Kepala Desa

- a. Berapa jumlah ADD yang di terima oleh desa abbatireng dan apakah sama dengan desa lain yang ada di Kecamatan Gilireng?
- b. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ?
- c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ?
- d. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban ADD?
- e. Apakah ada tim khusus yang di bentuk mengelolaa ADD ?

2. Daftar Pertanyaan untuk Ketua BPD Desa Abbatireng.

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses Perencanaan ADD di Desa Abbatireng ?
- b. Masalah apa yang sering ditemui BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban khusus ADD?

3. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Sekertaris Desa

- a. Apakah ada aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya ADD ?
- b. Berapa jumlah ADD yang di terima oleh Desa Abbatireng dan apakah sama dengan desa lain yang ada di Kecamatan Gilireng?
- c. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ?
- d. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ?
- e. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban ADD?

4. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Bendahara Desa

- a. Dalam melaksanakan Penatausahaan hal apa yang dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Buku apa yang harus disiapkan dalam melakasanakan pengelolaan keuangan Desa
- c. Hal apa yang menjadi kendala bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya.

5. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

- a. Apakah anda mengetahui apa yang di maksud dengan ADD ?
- b. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang di Desa Abbatireng ?
- c. Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan Pengelolaan ADD ?
- d. Bagaimana proses penginformasian kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa ?
- e. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemrintah Desa Abbatireng tepat sasaran?
- f. Sebaiknya hal apa yang harus dilaksanakan pemerintah Desa?

6. Daftar Pertanyaan Penelitian untuk Kepala Dusun.

- a. Sebelum melaksanakan Musrenbang hal apa yang dilakukan oleh kepala Dusun?
- b. Menurut anda apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ?

7. Daftar pertanyaan Penelitian Kasi Keuangan PMD

- a. Bagaimana pendapat ibu proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang di laksanakan oleh pemerintah Desa abbatireng ?